

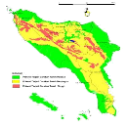


RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2021

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

**RENJA
2021**

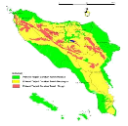




KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmad dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua serta tidak lupa juga mengucapkan salawat dan salam kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya dari alam kegelapan kealam yang lebih beriman dan berpendidikan sebagaimana saat ini sehingga ***Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2021*** telah dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang disusun sesuai sistematika penulisan yang ditetapkan dengan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

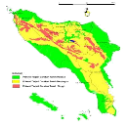
Sementara itu Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di susun dan buat berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah** dan



Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2021.

Rincian Program/Kegiatan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021 merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari suatu rencana yaitu Rencana Strategis (Renstra) selama kurun waktu lima tahun Pemerintah Aceh Periode Tahun 2017-2022 yang telah merencanakan pembangunan dan Program Prioritas selama lima tahun mendatang. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan yang lebih tepat dimasa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan dan pertimbangan sumberdaya yang tersedia. Oleh sebab itu, dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan suatu perencanaan tahunan yang dikenal dengan perencanaan kerja untuk dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.

Sebagaimana diketahui, Rencana Kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah untuk menjawab tuntutan dan perubahan lingkungan yang begitu cepat dalam kurun waktu satu tahun mendatang serta issue strategis, baik yang berasal dari dalam (*internal*) maupun yang berasal dari luar (*eksternal*) organisasi. Dengan adanya pendekatan dan sinergi serta berkesinambungan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh diharapkan dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Aceh selama periode 2017-2022, dengan memperhitungkan kekuatan dan peluang yang ada serta kelemahan dan ancaman yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah.

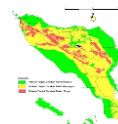


Untuk itu kita harapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021 dapat menjadi pedoman dan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021 dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh periode tahunan dan lima tahunan. Dalam penyusunan dokumen Renja tentunya masih terdapat kekurangan, namun upaya untuk melakukan penyempurnaan akan terus dilakukan demi terwujudnya administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Akhirnya mengingat Renja yang disusun merupakan komitmen bersama bagi jajaran pimpinan dan aparatur di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, maka diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar demi tercapainya visi, misi dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

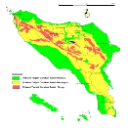
Banda Aceh, Maret 2020
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh,


A. HANAN, SP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680705 199103 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019	16
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPA. <i>Tabel T-C. 29</i>	16
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. <i>Tabel T-C. 30</i>	60
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.....	64
2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPA Tahun 2021 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. <i>Tabel T-C. 31</i>	68
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. <i>Tabel T-C. 32</i>	82
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	85
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	85
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2021	92
3.3. Sasaran Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dan Perkiraan Maju Tahun 2022	94
BAB IV PENUTUP.....	114



BAB I

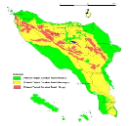
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

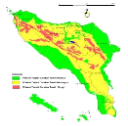
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh yang berperan dalam membangun bidang pertanian dan perkebunan memerlukan sistem perencanaan secara simultan yang mempertimbangkan faktor kondisi riil wilayah/daerah, anggaran, kemampuan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi. Penganggaran dan perencanaan berbasis kinerja



diarahkan pada perencanaan yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan yang dimiliki oleh SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk melaksanakan tugas serta pekerjaan percepatan pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan secara lebih maju menuju swasembada pangan berkelanjutan. Oleh karena itu Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021 sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2021, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2017-2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJMA) Periode Tahun 2017-2022.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021 dilakukan dengan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down*, *bottom-up* dan *money follow program*. Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan metoda dan kerangka berpikir yang merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui musrenbang, Pendekatan politis adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berupa kebijakan-kebijakan kepala daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), hasilnya akan diselaraskan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Sistem penganggaran sebelumnya masih menggunakan sistem *money follow function*, dimana anggaran mengikuti tugas dan fungsi pada kementerian lembaga. Sejak tahun 2017, anggaran Negara



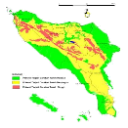
harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, inilah yang disebut *Money Follow Program*, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran.

Melalui pendekatan ini diharapkan :

1. adanya skala prioritas alokasi yang tinggi pada program-program yang memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat;
2. program dan kegiatan yang akan didanai lebih tegas dan jelas, sehingga jelas sasaran yang akan dicapai lebih optimal dan teratur;
3. mendorong terciptanya efisiensi melalui koordinasi yang jelas antarprogram dan kegiatan.

Konsep *money follow program* menegaskan perlunya pendekatan penganggaran yang berdasarkan pada bobot program/ kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

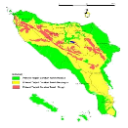
Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Aceh yang bertugas melaksanakan sebagian pencapaian **tujuan** dan **sasaran** yang terkandung dalam **Visi Pemerintah Aceh** yaitu **"TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI"** dalam rangka mencapai sasaran **Misi Pemerintah Aceh**. Terdapat lima misi dari sepuluh misi Pemerintah Aceh yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan Misi ke : 6) Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan; 4) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional; 8) Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif; 9) Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *Evidence Based Planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan, dan 10) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Disamping itu Dinas Pertanian dan Perkebunan juga sangat



erat kaitannya dengan pencapaian keberhasilan Program **15 Unggulan Aceh Hebat**. Dari 15 Unggulan Aceh Hebat Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh bertugas mendukung suksesnya 15 Unggulan Aceh Hebat antara lain Unggulan Aceh Hebat ke : 03) Aceh Carong; 05) Aceh Meugoe dan Meulaot; 06) Aceh Troe; 07) Aceh Kreatif; 08) Aceh Kaya; 13) Aceh Green, dan 15) Aceh Semeugot.

Dalam pencapaian keberhasilan Visi Misi Pemerintah Aceh dan Program Unggulan Aceh Hebat, Bappeda telah mencanangkan 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Aceh dalam RKPA Tahun 2021 dengan Thema "PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAN KONEKTIFITAS UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS". Dari delapan prioritas RKPA Tahun 2021 terdapat Empat Prioritas yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh diantaranya Prioritas : 1) Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran; 3) Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Pengembangan Kawasan Strategis dan Penguatan Konektifitas; 4) Peningkatan Ketahanan Pangan dan Energi; 6) Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Hasil Pertanian, Industri Kreatif, dan Pariwisata; dan 7) Optimalisasi Sumberdaya Alam berkelanjutan dan Penurunan Resiko Bencana;

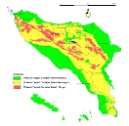
Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2021 disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) yang memuat "Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 serta Renstra SKPA, Analisis Kinerja Pelayanan SKPA, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA, Review Terhadap Rancangan Awal RKPA serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat".



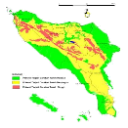
1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman.
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN).
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Penda).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
10. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura.
12. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
13. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
14. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



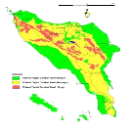
16. Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 Tahun 2012 Tentang Kawasan Pertanian Tanaman Pangan.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 830 Tahun 2016 Tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



26. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 Tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional.
29. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.
30. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan
31. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
32. Peraturan Gubernur No. 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh; dan
33. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 520 Tahun 2017 Tentang Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
34. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2021 merupakan Pedoman dan Acuan dalam pelaksanaan rencana program/kegiatan SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam kurun waktu satu tahun yang akan



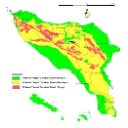
datang, sehingga arah dan tujuan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dapat konsisten dan berkesinambungan. Dimana rencana kerja ini telah disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam kurun waktu dimulai sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.

Maksud dan Tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2019 dan Capaian Renstra SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
2. Menganalisis Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam rangka mendukung Rencana Kerja Program/Kegiatan yang ingin dicapai.
3. Merumuskan isu-isu penting dalam rangka Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi serta Kewenangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
4. Melakukan Review Terhadap Rencana Awal RKPA pada tahun yang akan datang.
5. Menelaah Usulan Program/Kegiatan Masyarakat agar dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mendukung Program Prioritas Pemerintah Aceh melalui Dinas Teknis pada SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, maka tujuan Renjana Kerja (Renja) dalam rangka Pembangunan SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang ingin dicapai pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan *Good Government* dilingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan, efektivitas *pengawasan* kinerja untuk pelayanan publik.
- b. Mempercepat distribusi sarana produksi (Saprodi) dan hasil panen dan bertambahnya luas areal Penanaman Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.



- c. Meningkatkan mutu hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pengembangan pemasaran hasil produk pertanian dan perkebunan unggulan daerah melalui penelitian-penelitian, Pameran Pembangunan Daerah dan Nasional dan Luar Negeri sekaligus sebagai ajang promosi hasil produk pertanian unggulan daerah.
- d. Meningkatkan penerapan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna dalam rangka budidaya tanaman padi, palawija, hortikultura dan perkebunan.
- e. Peningkatan penumbuhan dan pengembangan kawasan (sentra agribisnis) spesifik lokasi tanaman padi, palawija. Hortikultura dan Perkebunan.
- f. Peningkatan sistem peramalan, pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman pertanian dan perkebunan.
- g. Penguatan UPJA Provinsi dan Kabupaten dengan membentuk brigade tanam dan brigade panen.
- h. Penguatan Peran dan Fungsi UPTD Lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
- i. Penguatan Institusi Perbenihan Balai Benih Induk dan Balai Benih Utama.
- j. Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana Penyuluh dan Petani.

1.4. Sistematika Penulisan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD pasal 78 menyatakan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 42 Tanggal 2020

tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPA agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPA, proses penyusunan Renja SKPA, keterkaitan antara Renja SKPA dengan dokumen RKPA, Renstra SKPA, dengan Renja K/L dan Tindak Lanjutnya dengan Proses penyusunan RAPBA.

1.2. Landasan Hukum

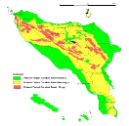
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan SKPA, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPA.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPA.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPA serta susunan garis besar isi dokumen.



BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

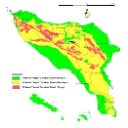
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPA

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2020, mengacu kepada APBA tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPA sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPA berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPA tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPA mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPA dan/atau realisasi APBA untuk SKPA yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan pada bab ini, antara lain :

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPA;
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Tabel yang harus disajikan adalah Tabel T-C. 29



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPA berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPA, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPA serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

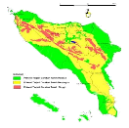
Jika SKPA yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPA perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPA yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPA yang disesuaikan menurut SKPA masing-masing, dengan format Tabel T-C.30.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA

Berisikan uraian mengenai :

- Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPA dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPA, diuraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPA Provinsi dengan



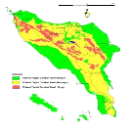
SKPK Kabupaten/Kota serta dengan Kementerian Pertanian di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPA;
- Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals) / SDGs;
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPA; dan
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPA dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPA, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampiran tabel T-C.31.



BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPA

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPA.

3.3. Program dan Kegiatan

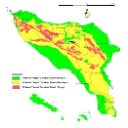
Berisikan penjelasan mengenai :

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misalnya:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- Pengentasan kemiskinan;
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
- Pengembangan daerah terisolir.

- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan;



- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu;
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPA, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel T-C.33.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPA.

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019.

Tahun 2019 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Periode 2017 - 2022, dari lima tahun masa pelaksanaan program pembangunan sebagaimana telah dituangkan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Pada Tahun 2019 adalah awal dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh serta Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan Pada Tahun 2019.

Realisasi Capaian Kinerja Program Rencana Kerja tersebut sebagaimana telah didokumentasikan kedalam RKA-APBA dan DPA APBA Tahun 2019. Dari program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 mengalami kenaikan besaran pagu dari Target Kinerja yang akan dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam RPJM Aceh, Renstra dan Renja Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Aceh Tahun 2019 sebesar Rp. 360.512.757.997,-, sedangkan realisasi capaian kinerja program dalam DPA-SKPA Tahun 2019 sebesar Rp. 323.137.489.592.- (89,63%), dengan sisa anggaran sebesar Rp. 37.375.268.405.- (10.37%).

Realisasi pagu terhadap capaian program tahun 2019 tersebut adanya penurunan realisasi yang disebabkan adanya kegiatan yang dirasionalkan. Dari target dan realisasi capaian rencana kerja tahun 2019 terdapat beberapa perubahan besaran pagu dan rekening. Adapun penjelasan target dan realisasi capaian kinerja program sebagai berikut :

BELANJA TIDAK LANGSUNG.

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 718 orang yang terdiri dari Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP Aceh. Pagu Anggaran yang disediakan sesuai dengan Renstra untuk tahun 2019 sebesar Rp. 83.405.387.000.- dengan capaian realisasi kinerja sebagaimana tertera dalam DPPA-APBA sebesar Rp. 78.483.602.455.- (94,10%). Dengan sumber dana DAU sebesar Rp. 47.021.362.000 dan PAA sebesar Rp. 36.384.025.000.-

BELANJA LANGSUNG

Alokasi dana untuk belanja langsung Tahun 2019 adalah Rp.277.107.370.997,- dengan realisasi fisik kegiatan 94,86% dan realisasi keuangan Rp. 244.653.887.137,- atau sebesar 88,29% sisa dana Rp. 32.453.483.860,-. (11,71%), dengan sumber dana PAA sebesar Rp. 2.756.193.915, BLUD sebesar Rp. 2.000.000.000, DBH sebesar Rp. 3.230.000.000, DBHCHT sebesar Rp. 5.787.725.100, Dana Perimbangan DAU sebesar Rp. 23.240.087.348, DAK Fisik sebesar Rp. 12.750.000.000 dan OTSUS ACEH sebesar Rp. 213.752.450.816. Sisa lebih pelaksanaan anggaran (SILPA) yang tidak dapat dilaksanakan antara lain disebabkan karena :

1. Sisa Tender.
2. Gagal Tender (pekerjaan tidak terealisasi).
3. Waktu pelaksanaan pekerjaan terbatas.
4. Efisiensi dari penetapan harga penawaran yang lebih rendah, pantas, dan wajar dan tidak mengurangi kualitas.
5. Efisiensi dari penyediaan jasa surat menyurat, perjalanan dinas, bahan bakar minyak/gas dan pelumas, pembayaran telepon, air, listrik, internet, cetak, penggandaan, honor-honor, penggantian suku cadang, pajak kendaraan bermotor, bahan praktek/keterampilan, pakaian, kelengkapan kerja lapangan, peralatan/perlengkapan pakai habis, Pengadaan Alat Kantor lainnya dan alat bantu keamanan, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, asuransi kesehatan, uang saku dan transport peserta pertemuan,

jasa nara sumber, jasa pembaca doa/alquran, makanan dan minuman, transportasi, ATK, Pengadaan computer unit/jaringan, pengadaan bangunan gedung kantor, jasa service, pemeliharaan asset tetap dan asset lainnya, seminar kit, dan akomodasi pertemuan/workshop.

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Penyediaan jasa surat menyurat yang merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dengan target kinerja tahun 2019 besaran pagu dana sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 46.701.750,- (93,40%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 3.298.250 (6,6%). Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyampaian, pelayanan jasa surat menyurat dalam mempercepat proses administrasi. Kegiatan ini mencakup Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Perimbangan DAU.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik juga merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dengan target kinerja tahun 2019 besaran pagu dana Rp. 2.552.000.000,- realisasi fisik mencapai 90,47% dan realisasi keuangan Rp. 2.036.587.779,- (79,80%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 515.412.221,- (20,2%). Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya pelayanan administrasi kantor yang bermutu, tepat waktu dan tepat sasaran. Kegiatan ini mencakup pada Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja

mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Perimbangan DAU.

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dengan target kinerja tahun 2019 besaran pagu dana Rp. 448.435.825,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 425.435.825,- (94,83%). terjadi silpa sebesar 23.214.175, (5,17%). Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya proses percepatan pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan ini mencakup pada Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana DBH dan Perimbangan DAU.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dan sebagai penunjang kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2019 besaran pagu dana sebesar Rp. 3.700.000.000.- dengan realisasi fisik 87,63% dan realisasi keuangan Rp. 2.796.474.668.- (75,58%). Terjadinya silpa pada kegiatan ini sebesar Rp. 903.525.332,- (24,12%). Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perizinan pajak kendaraan operasional serta terpeliharanya sarana kerja tersebut. Kegiatan ini mencakup kendaraan roda dua dan empat dinas pada Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Perimbangan DAU.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Penyediaan jasa kebersihan kantor merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dan sebagai penunjang kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2019 besaran pagu dana sebesar Rp. 1.248.173.112,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 1.149.900.175,- (92,13%) Terjadinya silpa pada kegiatan ini sebesar Rp. 98.272.937,- (7,87%). Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa kebersihan kantor. Kegiatan ini mencakup Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Perimbangan DAU.

f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK).

Penyediaan jasa alat tulis kantor merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dan sebagai penunjang kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2019 besaran pagu dana sebesar Rp. 456.117.348,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 449.689.686,- (98,59%) Terjadinya silpa pada kegiatan ini sebesar Rp. 6.427.662,- (1,41%). Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan bahan kelengkapan kerja berupa ATK dalam rangka menunjang kelancaran proses administrasi. Kegiatan ini mencakup Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Perimbangan DAU.

g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dan sebagai penunjang kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2019 besaran pagu dana sebesar Rp. 350.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 98,79% dan realisasi keuangan

Rp.337.439.400,- (96,41%). Terjadi silpa sebesar Rp. 12.560.600.- (3,59%) Kedepan kita upayakan kembali penayangannya melalui media cetak. Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya proses administrasi perkantoran. Kegiatan ini mencakup Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Perimbangan DAU.

h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor merupakan kegiatan rutin setiap SKPA sebagai penunjang kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2019 besaran pagu dana sebesar Rp. 140.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 125.684.520,- (89,77%), terjadi silpa sebesar Rp.14.315.480,-(10,23%). Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terciptanya kelancaran proses kegiatan perkantoran. Kegiatan ini mencakup penyediaan komponen penerangan kantor Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Perimbangan DAU.

i. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan rutin setiap SKPA sebagai penunjang kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2019 besaran pagu dana sebesar Rp. 156.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar (97,88%) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 147.325.600,- (94,44%), Terjadi silpa sebesar Rp.

8.674.400.-(5,56%). Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan untuk mendukung kegiatan dinas dan bahan bacaan Sekolah serta implementasi pekerjaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundangan pada Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Perimbangan DAU.

j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.

Penyediaan makan dan minum merupakan kegiatan rutin setiap SKPA sebagai penunjang kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2019 besaran pagu dana sebesar Rp. 530.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 96,46% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 466.290.200,- (87,98%), terjadi silpa sebesar Rp. 63.709.800,- (12,02%). Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah Terciptanya optimasi pelayanan aparatur dan makan siswa dalam rangka proses belajar mengajar. Kegiatan ini mencakup pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, 4 UPTD dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Perimbangan DAU.

k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang juga merupakan kegiatan rutin setiap SKPA sebagai penunjang koordinasi kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2019 besaran pagu dana sebesar Rp. 949.700.000,- dengan realisasi fisik sebesar 99,63% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 893.387.283,- (94,07%) terjadi silpa sebesar Rp. 56.312.717,- (5,93%). Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya koordinasi kegiatan dengan pihak terkait. Kegiatan

ini mencakup target pada Sekretariat Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Perimbangan DAU.

I. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target kinerja tahun 2019 besaran pagu dana sebesar Rp. 6.923.857.000,- dengan realisasi fisik sebesar 98,36% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.496.954.290,- (93,83%) terjadi silpa sebesar Rp. 426.902.710,- (6,17%). Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah Terciptanya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan terbayarnya jasa tenaga kontrak (Non PNS). Kegiatan ini mencakup target pada Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Perimbangan DAU.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor.

Pembangunan gedung kantor merupakan kegiatan pengadaan prasarana bangunan gedung kantor dalam rangka pelaksanaan peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur dengan target kinerja tahun 2019 besaran pagu dana sebesar Rp. 5.457.393.796,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.452.832.499,- (99,92%) terjadi silpa sebesar Rp. 4.561.297,- (0,08%). Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya beberapa prasarana gedung kantor pada Dinas, 3 Sekolah Kedinasan dan 2 UPTD. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Perimbangan DAU.

b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

Penyediaan perlengkapan gedung kantor merupakan kegiatan rutin setiap SKPA sebagai penunjang sarana dan prasarana kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2019 besaran pagu dana sebesar Rp. 2.950.129.922,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.879.965.600,- (97,62%) terjadi silpa sebesar Rp. 70.164.322,- (2,38%). yang merupakan sisa tender. Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan sarana kerja aparatur dalam rangka kelancaran proses peningkatan pelayanan publik. Kegiatan ini mencakup pada Dinas. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana DBH dan Perimbangan DAU.

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

Rehabilitasi rutin/berkala gedung kantor merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dalam rangka untuk pemeliharaan Gedung kantor tempat kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2019 besaran pagu dana sebesar Rp. 560.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 559.708.971,- (99,95%) terjadi silpa sebesar Rp. 291.029,- (0,05%). Hal ini disebabkan adanya paket rehab yang mengalami keterlambatan pengumuman pemenang sehingga tidak mencukupi waktu pelaksanaan. indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terpelihara dan terehabnya prasarana gedung kantor kelengkapan kerja aparatur berupa rehabilitasi beberapa gedung kantor yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Kegiatan ini mencakup pekerjaan pada Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Perimbangan DAU.

d. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

Pemeliharaan sedang/berat gedung kantor merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dalam rangka untuk pemeliharaan sarana kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2019 besaran pagu dana sebesar Rp. 923.977.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 921.102.806,- (99,95%) terjadi silpa sebesar Rp. 2.874.194,- (0,31%). Hal ini disebabkan adanya paket rehab yang mengalami keterlambatan pengumuman pemenang sehingga tidak mencukupi waktu pelaksanaan. indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terpelihara dan terhabnya prasarana gedung kantor kelengkapan kerja aparatur berupa rehabilitasi beberapa gedung kantor yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Kegiatan ini mencakup pekerjaan pada Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana DBH dan Perimbangan DAU.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya dalam rangka meningkatkan disiplin aparatur dengan target kinerja tahun 2019 besaran pagu dana sebesar Rp. 1.289.470.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.266.667.600,- (98,23%) terjadi silpa sebesar Rp. 22.802.400,- (1,77%). Hal ini disebabkan pakaian dinas aparatur setiap tahunnya sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. indikator sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya disiplin aparatur. Kegiatan ini mencakup pekerjaan pada Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Perimbangan DAU.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparatur dalam pelayanan publik maka ditargetkan kinerja tahun 2019 besaran pagu dana sebesar Rp. 144.000.000.- dengan realisasi fisik sebesar 90,68% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 121.176.623.- (84,15%) terjadi silpa sebesar Rp. 22.823.377,- (15,85%). Hal ini disebabkan sisa dana kontrak, Disamping itu dalam menyeleksi aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis yang diperlukan lebih selektif terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatkan SDM aparatur pemerintah bidang pertanian dan perkebunan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Perimbangan DAU.

b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan merupakan kegiatan rutin pada SKPA dalam rangka mensosialisasikan berbagai kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundangan yang harus dilaksanakan dan diterapkan oleh aparatur untuk ketertiban administrasi dan dijalankan sesuai peraturan berlaku. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 98,63% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 110.974.000,- (92,48%), terjadi silpa sebesar Rp. 9.026.000 (7,52%). Kegiatan ini mencakup pertemuan sosialisasi Undang-Undang ASN dan Analisa Jabatan sesuai Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing tugas jabatan Aparatur Sipil Negara. Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah tersosialisasinya peraturan perundang-undangan kepada ASN lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan target 3 peraturan

perundangan selama 1 tahun. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Perimbangan DAU.

PROGRAM/KEGIATAN SPESIFIK DINAS.

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

a. Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis.

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dan pelaku agribisnis dalam hal teknis budidaya, pemeliharaan tanaman, peningkatan mutu hasil dan pemasaran hasil komoditas pertanian/perkebunan guna memperoleh peningkatan nilai tambah dalam rangka kemandirian dan kesejahteraan petani. Kegiatan ini merencanakan target kinerja program pada tahun 2019 (20 Angkatan dan 500 Petani), dengan alokasi pagu dana sebesar Rp. 1.186.132.518,- dari target yang direncanakan kinerja program pada tahun 2019 terealisasi fisik kegiatan tersebut sebesar 99,97% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.185.657.822,-. (99,96%) dengan realisasi dari target kinerja sebesar 40 Angkatan. Terjadi silpa sebesar Rp. 474.696.- Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

Dari besaran realisasi target dan pagu kegiatan tersebut berdasarkan indikator sasaran yang ingin dicapai antara lain terlaksananya pelatihan petani pelaku agribisnis sebanyak 40 angkatan dan 500 Petani. Melalui pelaksanaan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis di Kabupaten dengan hasil yang dicapai meningkatnya pengetuan dan keterampilan petani pelaku agribisnis.

- b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tani Melalui Pelatihan Teknologi Tepat Guna.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tani Melalui Pelatihan Teknologi Tepat Guna merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Tani Peningkatnya Indeks yang diterima petani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan rencana target capaian kinerja 4 kabupaten serta besaran pagu sebesar Rp. 2.559.950.000.- dengan realisasi fisik sebesar 84,87%, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.967.063.869,- (76,84%) dengan realisasi dari target kinerja sebesar 10 Kelompok dan 250 Petani. terjadi silpa sebesar Rp. 592.886.131.- (23,16%). Kegiatan dimaksud yang bersumber dari SILPA Otsus dan Dana Otsus Aceh.

- c. Kegiatan Pemberdayaan Keujreun Blang (P3A/GP3A).

Kegiatan Pemberdayaan Keujreun Blang (P3A/GP3A) merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pemberdayaan Keujreun Blang (P3A/GP3A). Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.608.800.000,- dengan realisasi fisik sebesar 96.68% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.512.415.600,- (94,01%), terjadi silpa sebesar Rp. 96.384.400 (5,99%). Dari rencana target capaian kinerja 17 kab/Kota dan 140 Petani. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

- d. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Semusim dan Rempas.

Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Semusim dan Rempas merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Semusim dan Rempas. Kegiatan ini

ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.816.964.000,- dengan realisasi fisik sebesar 99,99% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.800.070.691,- (99,07%), terjadi silpa sebesar Rp. 16.893.309,- (0,93%). Capaian dari target kinerja 4 kawasan dan 4 unit. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

- e. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Tahunan dan Penyegar.

Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Tahunan dan Penyegar merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Tahunan dan Penyegar. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 3.034.601.813,- dengan realisasi fisik sebesar 99,99% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.961.151.813,- (97,58%), terjadi silpa sebesar Rp. 73.450.000,- (2,42%). Dengan capaian target kinerja 5 Kawasan dan 24 Paket. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

- f. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.

Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan (Kajian Fungsi Alat dan Pelatihan). Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.141.750.000,- dengan realisasi fisik sebesar 96,97% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.061.728.659,- (92,99%), terjadi silpa sebesar Rp. 80.021.341,- (7,01%). Dengan capaian target kinerja 4 Komoditi, 8

Produk Olahan Jagung dan Ubi Kayu. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

- g. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura.

Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 790.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 761.557.435,- (96,40%), terjadi silpa sebesar Rp. 28.442.565,- (3,60%). Dengan capaian target kinerja 8 Kawasan dan 8 Kelompok. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

- h. Kegiatan Promosi atas Hasil Perkebunan Unggulan Daerah.

Kegiatan Promosi atas Hasil Perkebunan Unggulan Daerah merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Promosi atas Hasil Perkebunan Unggulan Daerah. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.170.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 95,23% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.061.655.082,- (90,74%), terjadi silpa sebesar Rp. 108.344.918,- (9,26%). Dengan capaian target kinerja 3 Kegiatan dan 4 Paket. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

- i. Kegiatan Promosi dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

Kegiatan Promosi dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan (Bazar produk Olahan, Fasilitasi kemitraan dan Pameran). Kegiatan ini

ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 545.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 96,58% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 946.996.606,- (91,19%), terjadi silpa sebesar Rp. 48.003.394,- (8,81%). Dengan capaian target kinerja 4 Eeven dan 3 Komoditi. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

j. Kegiatan Promosi dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura.

Kegiatan Promosi dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Promosi dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 960.300.000,- dengan realisasi fisik sebesar 97,35% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 913.884.002,- (95,17%), terjadi silpa sebesar Rp. 46.415.998,- (4,83%). Dengan capaian target kinerja 5 Even. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Silpa Otsus dan Otsus Aceh.

2. Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan.

a. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan.

Kegiatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 5.986.289.963,- dengan realisasi fisik sebesar 87,63% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.735.468.884,- (79,11%), terjadi silpa sebesar Rp. 1.250.821.793,- (20,89%). Dengan target capaian kinerja 23 Kabupaten/Kota. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh dan SILPA Otsus.

b. Kegiatan Upgrading Penyuluh Pertanian.

Kegiatan Upgrading Penyuluh Pertanian merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Upgrading Penyuluh Pertanian melalui Sinkronisasi dan Upgrading Data Penyuluhan Pertanian. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 2.280.600.000,- dengan realisasi fisik sebesar 99,96% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.226.000.969,- (97,61%), terjadi silpa sebesar Rp. 54.599.031,- (2,39%). Dengan target capaian kinerja 750 Penyuluh. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

c. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat Pertanian.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat Pertanian merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat Pertanian. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 583.200.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 560.813.300,- (96,16%), terjadi silpa sebesar Rp. 22.386.700,- (3,84%). Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dengan rencana target capaian kinerja 1 Paket. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

d. Kegiatan Pendidikan Kejuruan Pertanian.

Kegiatan Pendidikan Kejuruan Pertanian merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pendidikan Kejuruan Pertanian. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 7.694.569.753,- dengan realisasi fisik sebesar 99,71% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.079.820.534,- (92,01%), terjadi silpa sebesar Rp. 614.749.219,- (7,99%). Kegiatan ini dilakukan melalui peningkatan SDM Pertanian dengan

rencana target capaian kinerja 3 SMK-PP Aceh. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh dan SILPA Otsus.

- e. Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna.

Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna melalui pengadaan sarana dan prasarana, teknologi pertanian/perkebunan tepat guna. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 5.777.885.000,- dengan realisasi fisik sebesar 99,17% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.563.353.384,- (96,29%), terjadi silpa sebesar Rp. 214.531.616.- (3,71%). Dengan target capaian kinerja 23 Kabupaten/Kota dan 2 Kegiatan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

3. Program Peningkatan Teknologi Pertanian/Perkebunan.

- a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna.

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna dalam rangka program peningkatan teknologi pertanian merupakan unsur pendukung dalam peningkatan produksi hasil pertanian sebagai salah satu program prioritas Pemerintah Aceh. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 940.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 935.000.000,- (99,47%), terjadi silpa sebesar Rp. 5.000.000.- (0,53%). Kegiatan ini dalam rangka memenuhi kekurangan sarana dan sarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna. Dengan target capaian kinerja 2 Unit. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Migas Kabupaten/Kota.

4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

a. Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat.

Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terpeliharanya tanaman perkebunan milik rakyat. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 9.150.158.775,- dengan realisasi fisik sebesar 95,62% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.072.555.167,- (88,22%), terjadi silpa sebesar Rp. 1.077.603.608,- (11,78%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain Kopi 2.335 Ha, Karet 215 Ha, Kelapa 250 Ha, Kelapa Sawit 300 Ha, Kakao 580 Ha, Pala Rakyat 110 Ha, Kawasan Tembakau 30 Ha. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana DBHCHT dan Otsus Aceh.

b. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan Besar.

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan Besar merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya pembinaan usaha perkebunan besar. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.148.310.044,- dengan realisasi fisik sebesar 98,52% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.118.761.182,- (97,43%), terjadi silpa sebesar Rp. 29.548.862,- (2,57%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 150 Perusahaan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Perimbangan DAU.

c. Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan.

Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan

terlaksananya Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.238.450.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.228.911.500,- (99,23%), terjadi silpa sebesar Rp. 9.538.500,- (0,77%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 3 Komoditi, Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

d. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbenihan Tanaman Pangan.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbenihan Tanaman Pangan merupakan dukungan prioritas Program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbenihan Tanaman Pangan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 2.860.550.000,- dengan realisasi fisik sebesar 99,93% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.806.052.504,- (98,09%), terjadi silpa sebesar Rp. 54.497.496,- (1,91%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 5 Paket, Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana DAK Fisik dan Otsus Aceh.

e. Kegiatan Penyelenggaraan BLUD Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Kegiatan Penyelenggaraan BLUD Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Penyelenggaraan BLUD Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%). Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan regulasi pelaksanaan tidak tersedia.

- f. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbenihan Tanaman Hortikultura.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbenihan Tanaman Hortikultura merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbenihan Tanaman Hortikultura. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 5.272.200.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.727.479.570,- (89,67%), terjadi silpa sebesar Rp. 544.720.430,- (10,33%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 9 Paket, Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana DAK Fisik.

- g. Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura.

Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 2.471.370.000,- dengan realisasi fisik sebesar 96,40% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.299.133.192,- (93,03%), terjadi silpa sebesar Rp. 172.236.808,- (6,97%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 30 ton, 20.000 Btng dan 12 Jenis. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

- h. Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Penyegar.

Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Penyegar merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Penyegar. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp.

760.955.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 734.635.500,- (96,54%), terjadi silpa sebesar Rp. 26.319.500,- (3,46%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 60.757 Batang, Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

- i. Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Semusim dan Rempah.
Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Semusim dan Rempah merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Semusim dan Rempah. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 698.953.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 698.946.950,- (100%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 24.700 Btg Pala, 200.000 Batang Nilam, 215.700 Batang Serewangi. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Silfa Otsus.
- j. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Perkebunan.
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Perkebunan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Perkebunan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 2.614.508.067,- dengan realisasi fisik sebesar 99,38% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.549.747.007,- (97,52%), terjadi silpa sebesar Rp. 64.761.060,- (2,48%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 22 Kabupaten/Kota dan 3.160 Batang serta 1 Kebun. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

k. Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Desa Mandiri Benih Padi.

Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Desa Mandiri Benih Padi merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Pengembangan dan Penguatan DMB Padi. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.030.400.000,- dengan realisasi fisik sebesar 96,16% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 955.578.230,- (92,74%), terjadi silpa sebesar Rp. 74.821.770,- (7,26%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 690 Ha, Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

l. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Pangan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 3.540.500.000,- dengan realisasi fisik sebesar 96,49% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.298.290.600,- (93,16%), terjadi silpa sebesar Rp. 242.209.400,- (6,48%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain Benih 600 Ha, CBD 5.000 Ha, Stock Brigade, Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

m. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura. Kegiatan ini

ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 2.473.214.900,- dengan realisasi fisik sebesar 99,24% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.431.188.100,- (98,30%), terjadi silpa sebesar Rp. 42.026.800,- (1,70%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 7 Kabupaten, Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

n. Kegiatan Optimasi Lahan Pertanian.

Kegiatan Optimasi Lahan Pertanian merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Optimasi Lahan Pertanian. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 4.780.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 99,02% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.641.249.442,- (97,10%), terjadi silpa sebesar Rp. 138.750.558,- (2,90%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain Lahan Pertanian 157 Ha 5 Kabupaten, Lahan Perkebunan 813 Ha pada 9 Kabupaten. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

o. Kegiatan Perluasan Areal Pertanian.

Kegiatan Perluasan Areal Pertanian merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Perluasan Areal Pertanian. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 7.220.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 99,93% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.131.121.249,- (98,77%), terjadi silpa sebesar Rp. 88.878.751,- (1,23%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 2 Kabupaten 230 Ha, Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh Silfa Otsus.

p. Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen.

Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 13.834.859.559,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.818.868.051,- (99,88%), terjadi silpa sebesar Rp. 15.991.508,- (0,12%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain Traktor 4 WD 31 unit, Pompa Air 6 Unit, Hand Traktor 20 Unit. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

q. Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen.

Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Pengadaan Alat dan Mesin Pasca Panen. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 18.837.900.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.809.862.700,- (62,69%), terjadi silpa sebesar Rp. 7.028.037.300,- (37,31%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 32 Unit, Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh dan Silfa Aceh.

r. Kegiatan Peningkatan Prasarana Pertanian.

Kegiatan Peningkatan Prasarana Pertanian merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 17.791.875.000,- dengan realisasi fisik sebesar 99,89% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.709.990.800,- (93,92%), terjadi silpa sebesar Rp. 1.081.884.200,- (6,08%). Dari target kinerja

yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain Leaning 25.933 Mtr, Embu 1 Unit, Jalan Pertanian 14.714 Meter. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

s. Kegiatan Peningkatan Prasarana Perkebunan.

Kegiatan Peningkatan Prasarana Perkebunan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Peningkatan Prasarana Perkebunan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 34.511.500.000,- dengan realisasi fisik sebesar 99,84% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.322.612.883,- (99,45%), terjadi silpa sebesar Rp. 188.887.117 (0,55%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 87.377 Meter, Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh dan Silfa Aceh.

t. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Mekanisasi Pertanian.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Mekanisasi Pertanian merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Mekanisasi Pertanian. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 4.878.700.000,- dengan realisasi fisik sebesar 99,88% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.809.042.513,- (98,57%), terjadi silpa sebesar Rp. 69.657.487,- (1,43%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 1 Kegiatan, Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana DAK Fisik dan Otsus Aceh.

u. Kegiatan Penyelenggaraan BLUD Mekanisasi Pertanian.

Kegiatan Penyelenggaraan BLUD Mekanisasi Pertanian merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Penyelenggaraan BLUD Mekanisasi Pertanian. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. Tidak dilaksanakan disebabkan karena peraturan pelaksanaan kegiatan BLUD belum tersedia.

p. Kegiatan Pengembangan Kawasan Padi.

Kegiatan Pengembangan Kawasan Padi merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi melalui Pengembangan Kawasan Padi. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 14.453.825.000,- dengan realisasi fisik sebesar 59,17% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.093.993.135,- (49,08%), terjadi silpa sebesar Rp. 7.359.831.865,- (50,92%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain Kawasan Padi 21 Kabupaten/Kota, Pengembangan Kawasan Padi 1 Kabupaten, Pengembangan Cluster Padi 1 Kabupaten. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh dan Silfa.

v. Kegiatan Pengembangan Kawasan Jagung.

Kegiatan Pengembangan Kawasan Jagung merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengembangan Kawasan Jagung. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 2.908.041.936,- dengan realisasi fisik sebesar 95,55% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.660.487.308,- (91,49%), terjadi silpa sebesar Rp. 247.554.628,- (8,51%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara

lain 11 Kabupaten. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

w. Kegiatan Pengembangan Kawasan Aneka Kacang dan Umbi.

Kegiatan Pengembangan Kawasan Aneka Kacang dan Umbi merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengembangan Kawasan Aneka Kacang dan Umbi melalui Pengembangan Kawasan Kacang Tanah. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 718.985.000,- dengan realisasi fisik sebesar 96,26% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 633.007.291,- (88,04%), terjadi silpa sebesar Rp. 85.977.709 (11,96%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 4 Kabupaten, Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

x. Kegiatan Pengembangan Kawasan Buah-buahan.

Kegiatan Pengembangan Buah buahan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Pengembangan Kawasan Buah-buahan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.162.516.669,- dengan realisasi fisik sebesar 92,29% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 984.974.135,- (84,73%), terjadi silpa sebesar Rp. 177.542.534.- (15,27%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 4 Kabupaten, Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

y. Kegiatan Pengembangan Sentra Buah-buahan.

Kegiatan Pengembangan Sentra Buah-buahan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Pengembangan Sentra Buah-buahan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 7.091.330.000,- dengan realisasi fisik

sebesar 91,39% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.176.570.385,- (87,10%), terjadi silpa sebesar Rp. 914.759.615,- (12,90%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 10 Kabupaten/Kota, Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

z. Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran.

Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Pengembangan Kawasan Bawang Merah. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 3.299.608.000,- dengan realisasi fisik sebesar 97,59% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.108.112.329,- (94,20%), terjadi silpa sebesar Rp. 191.495.671,- (5,80%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 8 Kabupaten, Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

aa. Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkebunan Komoditi Strategis.

Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkebunan Komoditi Strategis merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya pengembangan kawasan perkebunan Komoditi Strategis. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 13.044.024.700,- dengan realisasi fisik sebesar 86,06% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.487.423.545,- (80,40%), terjadi silpa sebesar Rp. 2.556.601.155,- (19,60%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 1.160 Ha, Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

bb. Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkebunan Komoditi Unggul.

Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkebunan Komoditi Unggul merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya pengembangan kawasan perkebunan Komoditi Unggul. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 10.585.429.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.801.416.770,- (92,59%), terjadi silpa sebesar Rp. 784.012.230,- (7,41%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 850 Ha. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

cc. Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikulura.

Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikulura merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikulura. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 2.172.700.000,- dengan realisasi fisik sebesar 99,03% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.132.987.286,- (98,17%), terjadi silpa sebesar Rp. 39.712.714,- (1,83%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 22 Kabupaten/Kota. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

dd. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan Perkebunan.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan Perkebunan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan

Perkebunan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 976.800.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 867.136.600,- (88,77%), terjadi silpa sebesar Rp. 109.663.400,- (11,23%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 22 Kabupaten/Kota. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana DAK Fisik dan Otsus Aceh.

ee. Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Perkebunan.

Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Perkebunan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Perkebunan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.380.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 89,25% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.154.568.000,- (83,66%), terjadi silpa sebesar Rp. 225.432.000,- (16,34%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 4 Komoditi. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

ff. Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 3.706.745.000,- dengan realisasi fisik sebesar 99,50% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.653.411.875,- (98,56%), terjadi silpa sebesar Rp. 53.333.125,- (1,44%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain

OPT Ramah Lingkungan 300 Ha, OPT Daerah Endemis 700 Ha, PHT Tikus 200 Ha, Perbanyak Ager Hayati 25 Kelompok. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

gg. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Proteksi TPH dan Perkebunan.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Proteksi TPH dan Perkebunan merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Proteksi TPH dan Perkebunan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 2.253.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.940.743.915,- (86,14%), terjadi silpa sebesar Rp. 312.256.085,- (13,86%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 23 Kabupaten/Kota. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana DAK Fisik dan Otsus Aceh.

hh. Kegiatan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Rakyat.

Kegiatan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Rakyat merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya rehabilitasi tanaman perkebunan rakyat. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.493.505.560,- dengan realisasi fisik sebesar 99,64% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.331.788.650,- (89,17%), terjadi silpa sebesar Rp. 161.716.910,- (10,83%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain Rehab Tanaman Cengkeh Rakyat 300 Ha, Rehab Kakao 250 Ha, Rehab Kopi Rakyat 500 Ha, Rehab Kelapa 400 Ha, Rehab Pela 300 Ha. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh dan Silfa.

ii. Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan.
Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.034.888.225- dengan realisasi fisik sebesar 99,96% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.009.473.046,- (97,54%), terjadi silpa sebesar Rp. 25.415.179.- (2,46%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 22 Kabupetn/Kota, Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

jj. Kegiatan Perlindungan Tanaman Perkebunan.
Kegiatan Perlindungan Tanaman Perkebunan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun Rakyat. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 89,86% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 327.782.443,- (65,56%), terjadi silpa sebesar Rp. 172.217.557.- (34,44%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 1 Kabupaten, Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

kk. Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Perkebunan.

Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Perkebunan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya pengendalian OPT Kopi. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 99,85% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 431.987.000,- (86,40%), terjadi silpa sebesar Rp. 68.013.000.- (13,60%). Dari target kinerja yang di rencanakan

teralisasi kegiatan tersebut antara lain 2 Komoditi dan 200 Ha, Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

a. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 2.009.632.500,- dengan realisasi fisik sebesar 92,38% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.799.446.501,- (89,54%), terjadi silpa sebesar Rp. 210.185.999,- (10,46%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 4 Dokumen Perencanaan terhadap pembangunan Perencanaan TPH pada 23 Kabupaten/Kota.

b. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Perkebunan.

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Perkebunan merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Perencanaan Pembangunan Perkebunan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 765.890.000,- dengan realisasi fisik sebesar 90,63% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 648.900.025,- (84,72%), terjadi silpa sebesar Rp. 116.989.975,- (15,28%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 2 Dokumen Perencanaan terhadap pembangunan Perkebunan pada 23 Kabupaten/Kota.

- c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 718.856.000,- dengan realisasi fisik sebesar 99,79% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 687.818.000,- (95,68%), terjadi silpa sebesar Rp. 31.038.000,- (4,32%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 2 Dokumen Evaluasi terhadap Program/kegiatan Pembangunan Pertanian TPH pada 23 Kabupaten/Kota.

- d. Kegiatan Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Kegiatan Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.006.374.762,- dengan realisasi fisik sebesar 98,63% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 960.496.500,- (95,44%), terjadi silpa sebesar Rp. 45.878.262,- (4,56%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 1 Dokumen Data Kompilasi Data Pembangunan Pertanian TPH pada 23 Kabupaten/Kota.

- e. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perkebunan.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perkebunan merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator

kegiatan terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perkebunan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 279.008.918,- dengan realisasi fisik sebesar 93,95% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 252.372.747,- (90,45%), terjadi silpa sebesar Rp. 26.636.171,- (9,55%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 1 Dokumen Data Kompilasi Data Pembangunan Pertanian TPH pada 23 Kabupaten/Kota.

f. Kegiatan Penyusunan Data Statistik dan Informasi Perkebunan.

Kegiatan Penyusunan Data Statistik dan Informasi Perkebunan merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Penyusunan Data Statistik dan Informasi Perkebunan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 906.294.157,- dengan realisasi fisik sebesar 99,44% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 838.025.300,- (92,47%), terjadi silpa sebesar Rp. 68.268.857,- (7,53%). Dari target kinerja yang di rencanakan terealisasi kegiatan tersebut antara lain 1 Dokumen Data Kompilasi Data Pembangunan Perkebunan pada 23 Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan dan terealisasi pada tahun 2019 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2020, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down*, *bottom-up* dan *money follow program* dilaukan belum maksimal.
2. Keterbatasan data dan informasi;
3. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
4. Belum optimalnya koordinasi antar Kabupaten/Kota;

5. Belum dipahaminya secara utuh tentang output yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan ;
6. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPA maupun dalam RPJMA dalam merencanakan kegiatan.
7. Dalam melaksanakan kegiatan setiap penanggung jawab kegiatan untuk tidak bertumpu pada pencapaian realisasi fisik dan keuangan semata, akan tetapi perlu evaluasi lebih mendalam terhadap pencapaian realisasi manfaat dari pelaksanaan setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Perlu merencanakan kegiatan kedepannya untuk dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
9. Kegiatan yang bersumber dana dari DOKA Kabupaten/Kota yang terdapat didalam DPA APBA rata-rata sulit dapat dilaksanakan disebabkan salah penempatan rekening, penjabaran rincian tidak sesuai dengan nomenklatur,

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Pada tahun 2019 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mengelola **Anggaran sebesar Rp. 360.512.757.997.-** **Terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 83.405.387.000.-** dan **Belanja Langsung sebesar Rp. 277.107.370.997.-.** dengan Sumber Dana yaitu **PAA sebesar Rp. 2.756.193.915.-** **DAK FISIK sebesar Rp. 12.750.000.000.-,** **OTSUS ACEH sebesar Rp. 213.752.450.816,-,** **DBH sebesar Rp. 3.230.000.000.-** **DBHCHT sebesar Rp. 5.787.725.100.-** **Dana Perimbangan DAU sebesar Rp. 23.240.087.348.-** **BLUD sebesar Rp. 2.000.000.000.-.** Dari besaran anggaran tersebut melaksanakan sebanyak 9 Program dan 79 Kegiatan terdiri dari :

- Urusan Pilihan sebanyak 4 Program, 19 Kegiatan;
- Urusan Pangan sebanyak 1 Program, 5 Kegiatan;
- Urusan Pertanian sebanyak 3 Program, 49 Kegiatan;
- Urusan Perencanaan sebanyak 1 Program, 6 Kegiatan dan
- Belanja Tidak Langsung pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai.

Dari seluruh program/kegiatan tersebut dapat terealisasi fisik sebesar 76,86% dan realisasi keuangan sebesar 88,29% dari target yang harus dicapai sebesar 100%.

Beberapa evaluasi realisasi program/kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, realisasi fisiknya 95,18% dan realisasi keuangannya 87,82%. Hal ini disebabkan oleh :
 - Sisa Dana Kontrak.
 - Proses pelaksanaan tender/pengadaan melalui ULP gagal dilaksanakan.

2. Program Peningkatan dan Prasarana Aparatur, realisasi fisiknya 100% dan realisasi keuangannya 99,21%. Hal ini disebabkan oleh :
 - Sisa Dana Kontrak.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, realisasi fisiknya 100% dan realisasi keuangannya 98,23%. Hal ini disebabkan oleh :
 - Sisa Dana Kontrak.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, realisasi fisiknya 94,29% dan realisasi keuangannya 87,94%. Hal ini disebabkan oleh :
 - Sisa Dana Kontrak.
 - Proses pelaksanaan tender/pengadaan melalui ULP gagal dilaksanakan.
5. Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan, realisasi fisiknya sebesar 96,36% dan realisasi keuangan sebesar 90,34%. Hal ini disebabkan oleh :
 - Sisa Dana Kontrak.
 - Proses pelaksanaan tender/pengadaan melalui ULP gagal dilaksanakan.
6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, realisasi fisiknya sebesar 96,11% dan realisasi keuangan sebesar 92,63%. Hal ini disebabkan oleh:
 - Sisa Dana Kontrak.
7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, realisasi fisiknya sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,47%. Hal ini disebabkan oleh :
 - Sisa Dana Kontrak.

8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, realisasi fisiknya sebesar 94,25% dan realisasi keuangan sebesar 87,07%. Hal ini disebabkan oleh :

- Sisa Dana Kontrak.
- Proses pelaksanaan tender/pengadaan melalui ULP gagal dilaksanakan.

9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, realisasi fisiknya sebesar 95,39% dan realisasi keuangan sebesar 91,22%. Hal ini disebabkan oleh :

- Sisa Dana Kontrak.

Pada faktor–faktor penyebab tersebut di atas maka Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melakukan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil sebagai berikut :

- Melakukan Monitoring, Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya.

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan dengan hasil evaluasi bahwa dari kegiatan pelaksanaan anggaran yang dirasakan masih adanya keterlambatan realisasi pertanggungjawaban keuangan, namun dalam pelaksanaan kegiatan relatif sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun bersangkutan.

- Menganalisa data dan permasalahan yang ada

Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan, pada kegiatan peningkatan prasarana pertanian dan perkebunan dirasakan masih terdapat kendala dalam hal tahapan prosedur administrasi perencanaan dan penyiapan lahan, dan analisa dampak lingkungan maupun kajian terhadap peningkatan prasarana pertanian dan perkebunan belum dilaksanakan dalam hal mitigasi resiko

bencana maupun dampak lain yang ditimbulkan yang dapat merugikan masyarakat.

- Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada.

Aspek kerugian negara diupayakan resikonya dapat diminimalisir. kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada senantiasa dilakukan dengan mengikuti prosedur dan sistem sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- Mengusulkan anggaran lanjutan untuk kegiatan yang diperkirakan tidak akan selesai pada tahun bersangkutan.

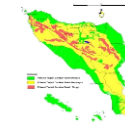
Apabila terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan pada tahun bersangkutan karena suatu hal maka kegiatan diusulkan anggaran lanjutan.

Kegiatan yang akan diusulkan harus dikaji dulu permasalahannya apakah karena gagal lelang, pelaksanaan terlambat, atau faktor lain yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2021



Tabel T-C.29

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S/D TAHUN 2019

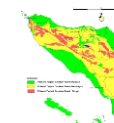
Nama SKPA : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA TAHUN 2017-2022)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPA TAHUN 2020)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (2020)	
					TARGET RENJA SKPA TAHUN 2019	REALISASI RENJA SKPA TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
2.00.03.2.00.03.00	NON PROGRAM									
	Belanja Tidak Langsung	Terlaksananya pembayaran gaji dan hak-hak pegawai	718 Org	718	718	718	100	718	2154	3,00
2.00.03.2.00.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
2.00.03.2.00.03.01.01.001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyampaian Pelayanan Jasa Surat Dalam Percepatan Proses Administrasi	12 Bln	12	12	12	100	12	12	20
2.00.03.2.00.03.01.01.002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan	12 Bln	12	12	12	100	12	12	20
2.00.03.2.00.03.01.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Terlaksananya peningkatan perlengkapan dan peralatan kantor	12 Bln	12	12	12	100	12	12	20
2.00.03.2.00.03.01.01.006	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya kenyamanan kinerja aparatur dalam rangka proses pelayanan public	12 Bln	12	12	12	100	12	12	20
2.00.03.2.00.03.01.01.008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan	12 Bln	12	12	12	100	12	12	20
2.00.03.2.00.03.01.01.010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya peningkatan kebutuhan ATK pegawai	12 Bln	12	12	12	100	12	12	20
2.00.03.2.00.03.01.01.011	Kegiatan Pengadaan barang cetakan dan pengoandaan	Peningkatan pengadaan barang cetakan	12 Bln	12	12	12	100	12	12	20
2.00.03.2.00.03.01.01.012	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya kebutuhan alat penerangan gedung kantor	12 Bln	12	12	12	100	12	12	20
2.00.03.2.00.03.01.01.015	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kinerja sumberdaya aparatur pemerintah	12 Bln	12	12	12	100	12	12	20
2.00.03.2.00.03.01.01.017	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	terwujudnya peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada publik dan makan siswa	12 Bln	12	12	12	100	12	12	20
2.00.03.2.00.03.01.01.018	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya sinkronisasi dalam pencapaian kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran	12 Bln	12	12	12	100	12	12	20
2.00.03.2.00.03.01.01.022	Kegiatan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	memberikan kemudahan dalam proses pelayanan dan percepatan administrasi perkantoran	12 Bln	12	12	12	100	12	12	20
2.00.03.2.00.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
2.00.03.2.00.03.01.02.003	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor sebagai fasilitas kinerja aparatur didalam percepatan pelayanan publik	31 Pkt	11	16	16	100	5	5	16
2.00.03.2.00.03.01.02.007	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	34 Keg	21	10	10	100	5	5	15
2.00.03.2.00.03.01.02.022	Pemeliharaan rutin gedung perkantoran	Terpeliharanya gedung perkantoran yang merupakan aset pemerintahan	16 Unit	0	12	12	100	16	16	100
2.00.03.2.00.03.01.02.042	Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	menunjang kinerja aparatur dalam percepatan pelayanan masyarakat	46 Pkt	16	14	14	100	6	6	13
2.00.03.2.00.03.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR									
2.00.03.2.00.03.01.03.002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terlaksananya keseragaman identitas dan disiplin pegawai Dinas. 4 UPTD dan 3 sekolah kedinasan	2.766 Stel		2.766	2766	100	2.766	2.766	100
2.00.03.2.00.03.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR									
2.00.03.2.00.03.01.05.001	Kegiatan pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya motivasi, sumber daya Aparatur yang profesional dalam pelayanan publik	24 Keg	6	6	6	100	6	6	25
2.00.03.2.00.03.01.05.002	Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi ketentuan menurut peraturan dan penundang-undangan yang berlaku	24 Keg	6	6	6	100	6	6	25
2.00.03.2.00.03.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEJAHERAAN PETANI									
2.00.03.2.00.03.01.15.001	Kegiatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	142 Kls	32	40	35	88	375	375	264
2.00.03.2.00.03.01.15.013	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tani melalui Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Tani melalui Pelatihan Teknologi Tepat Guna	40 Klp					4	4	10
2.00.03.2.00.03.01.15.014	Kegiatan Pemberdayaan Kejujren Blang (P3A/GP3A)	Terlaksananya Pemberdayaan Kejujren Blang (P3A/GP3A)	20 Kab		1	1	100			
2.00.03.2.00.03.01.15.016	Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Tanaman Semusim dan Rempah	Terlaksananya Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Tanaman Semusim dan Rempah	19 Unit		21	21	99,07	6	6	32
2.00.03.2.00.03.01.15.017	Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman tahunan dan penyegar	Terlaksananya Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman tahunan dan penyegar	96 Unit		21	20	97,58	87	87	91
2.00.03.2.00.03.01.15.018	Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan	Terlaksananya Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan.	16 Keg					5	5	31
2.00.03.2.00.03.01.15.019	Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura	Terlaksananya Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura	8 Kawasan		8	8	96,40	4	4	50

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2021

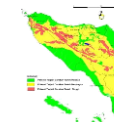


1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
2.00.03.2.00.03.01.15.020	Kegiatan Promosi atas hasil perkebunan unggulan daerah	Terlaksananya Promosi atas hasil perkebunan unggulan daerah	32	Keg	4	4	100	7	7	22	
2.00.03.2.00.03.01.15.021	Kegiatan Promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan	Terlaksananya Promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan	19	Keg	4	4	100	6	6	32	
2.00.03.2.00.03.01.15.022	Kegiatan Promosi dan pemasaran hasil tanaman hortikultura	Terlaksananya Promosi dan pemasaran hasil tanaman hortikultura	20	Keg	4	4	100	2	2	10	
2.00.03.2.00.03.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN										
2.00.03.2.00.03.01.18.002	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan	65	Unit	65	166	166	100			
2.00.03.2.00.03.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN PERKEBUNAN										
2.00.03.2.00.03.01.19.038	Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat	Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat	20.090	Ha	4.070	4.050	3.573	88.23	1.655	1.655	8
2.00.03.2.00.03.01.19.039	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan Besar	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan besar	23	Kab	23	22	21	97.43	150	150	652
2.00.03.2.00.03.01.19.043	Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan	Terlaksananya Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan	3	Kmdt		3	3	99.23	39	39	1300
2.00.03.2.00.03.01.19.044	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan	Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan	725	Ha		50	50	100	39	39	5
2.00.03.2.00.03.01.19.045	Kegiatan Penyelenggaraan BLUD produksi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terlaksananya Penyelenggaraan BLUD produksi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	Uptd		1	1	100			0
2.00.03.2.00.03.01.19.046	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman hortikultura	Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman hortikultura	36	Paket		6	6	100	10	10	28
2.00.03.2.00.03.01.19.047	Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura	5	Kmdt		5	5	93.46			
2.00.03.2.00.03.01.19.048	Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Penyegar	Terlaksananya Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Penyegar	5	Kmdt					394.950	394.950	7.899.000
2.00.03.2.00.03.01.19.049	Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Semusim dan Rempah	Terlaksananya Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Semusim dan Rempah	3	Kmdt					465.000	465.000	15.500.000
2.00.03.2.00.03.01.19.050	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan perkebunan	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan perkebunan	5	Keg					17	17	3
2.00.03.2.00.03.01.19.051	Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih Padi	Terlaksananya Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura	2.780	Ha		690	611	88.48			
	Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Desa Mandiri benih Padi	Terlaksananya Pengembangan dan Penguatan Desa Mandiri benih Padi	0						690	690	690
2.00.03.2.00.03.01.19.052	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Pangan	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Pangan	2.600	Ha		600	438	72.96	475	475	18
2.00.03.2.00.03.01.19.053	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Hortikultura	11	Kmdt					6	6	55
2.00.03.2.00.03.01.19.054	Kegiatan Optimalisasi lahan pertanian	Terlaksananya Optimalisasi lahan pertanian	4.000	Ha		1.000	971	97.10	200	200	5
2.00.03.2.00.03.01.19.055	Kegiatan Perluasan Areal Pertanian	Terlaksananya Perluasan Areal Pertanian	1.000	Ha		1.500	1.482	98.77	200	200	20
2.00.03.2.00.03.01.19.056	Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Prapanen	Terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian Prapanen	240	Unit		60	60	99.88	2.737	2.737	1140
2.00.03.2.00.03.01.19.057	Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen	Terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen	135	Unit		45	28	62.69	111	111	82
2.00.03.2.00.03.01.19.058	Kegiatan Peningkatan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian	12	Keg		3	3	93.32	17.950	17.950	149583
2.00.03.2.00.03.01.19.059	Kegiatan Peningkatan Prasarana Perkebunan	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Perkebunan	8	Keg		2	2	99.45	111.596	111.596	1394950
2.00.03.2.00.03.01.19.060	Kegiatan Pengawasan dan pembinaan peredaran peralatan mesin pertanian/perkebunan	Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan peredaran peralatan mesin pertanian/perkebunan	23	Kab					25	25	109
2.00.03.2.00.03.01.19.061	Kegiatan Pelatihan Operasionalisasi Alat Mesin Pertanian	Terlaksananya Pelatihan Operasionalisasi Alat Mesin Pertanian	32	Keg					100	100	313
2.00.03.2.00.03.01.19.062	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana UPTD Mekanisasi Pertanian	Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana UPTD Mekanisasi Pertanian	32	Keg		1	1	98.57	1	1	3
2.00.03.2.00.03.01.19.063	Kegiatan Penyelenggaraan BLUD Mekanisasi Pertanian	Terselenggaranya BLUD Mekanisasi Pertanian	4	Keg		1	0	0.00	1	1	25
2.00.03.2.00.03.01.19.064	Kegiatan Pengembangan kawasan padi	Terlaksananya Pengembangan kawasan padi	280.000	Ha		60.000	16.218	27.03	40.000	40.000	14
2.00.03.2.00.03.01.19.065	Kegiatan Pengembangan kawasan jagung	Terlaksananya Pengembangan kawasan jagung	31.500	Ha		6.000	5.239	87.31	4.090	4.090	13
2.00.03.2.00.03.01.19.066	Kegiatan Pengembangan kawasan aneka kacang dan umbi	Terlaksananya Pengembangan kawasan aneka kacang dan umbi	7.500	Ha		500	440	88.04	120	120	2
2.00.03.2.00.03.01.19.067	Kegiatan Pengembangan kawasan buah- buahan	Terlaksananya Pengembangan kawasan buah- buahan (aneka buah)	2	Kmdt		2	2	84.73			
2.00.03.2.00.03.01.19.068	Kegiatan Pengembangan sentra buah- buahan	Terlaksananya Pengembangan sentra buah- buahan (aneka buah)	6	Kmdt		3	3	87.10			
	Kegiatan Pengembangan Sentra Aneka Buah	Terlaksananya Pengembangan Sentra Aneka Buah	0	0					10	10	10
2.00.03.2.00.03.01.19.069	Kegiatan Pengembangan kawasan tanaman sayuran	Terlaksananya Pengembangan kawasan tanaman sayuran	3	Kmdt		3	3	94.20	40	43	1428
2.00.03.2.00.03.01.19.070	Kegiatan Pengembangan sentra sayur- sayuran	Terlaksananya Pengembangan sentra sayur- sayuran	3	Kmdt							
	Kegiatan Pengembangan Sentra Tanaman Sayuran	Terlaksananya Pengembangan Sentra Tanaman Sayuran	0	0					3	3	3
2.00.03.2.00.03.01.19.071	Kegiatan Pengembangan sentra biofarmaka dan florikultura	Terlaksananya Pengembangan sentra biofarmaka dan florikultura	2	Kmdt					20	20	1000
2.00.03.2.00.03.01.19.072	Kegiatan Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi strategis	Terlaksananya Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi strategis	5	Kmdt		5	4	80.40	1.446	1.450	29000
2.00.03.2.00.03.01.19.073	Kegiatan Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi unggul	Terlaksananya Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi unggul	5	Kmdt		5	5	92.59	872	877	17533
2.00.03.2.00.03.01.19.074	Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura	22	Kab		23	23	98.17	22	45	203
2.00.03.2.00.03.01.19.075	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan perkebunan	Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan perkebunan	22	Kab		4	4	88.77	17	21	93
2.00.03.2.00.03.01.19.076	Kegiatan Pengawasan peredaran dan sertifikasi Benih unggul tanaman perkebunan	Terlaksananya Pengawasan peredaran dan sertifikasi Benih unggul tanaman perkebunan	4	Kmdt		4	3	83.66	1	4	109
2.00.03.2.00.03.01.19.077	Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura	39	Keg		7	7	100	15	22	56
2.00.03.2.00.03.01.19.078	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana UPT Proteksi TPH dan perkebunan	Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana UPTD Balai Proteksi TPH dan perkebunan	18	Kab		4	4	100	5	9	50

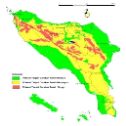
RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2021



1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
2.00.03.2.00.03.01.19.079	Kegiatan Rehabilitasi tanaman Perkebunan Rakyat	Terlaksananya Rehabilitasi tanaman Perkebunan Rakyat	7.750 Ha		1.750	1.561	89,19	1.430	2.991	39
2.00.03.2.00.03.01.19.080	Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan	16 Keg		4	4	100	9	13	81
2.00.03.2.00.03.01.19.081	Kegiatan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Perlindungan Tanaman Perkebunan	16 Kab		4	3	65,25	1	4	23
2.00.03.2.00.03.01.19.082	Kegiatan Gerakan pengendalian OPT Perkebunan	Terlaksananya Gerakan pengendalian OPT Perkebunan	12 Kmdt		4	3	86,40	100	103	862
2.00.03.2.00.03.01.19...	Kegiatan Pengembangan Perkebunan di Lahan Dayah/Pesantren	Terlaksananya Pengembangan Perkebunan di Lahan Dayah/Pesantren	12 Kab					100	100	833
	Kegiatan Pemberdayaan Keujeun Blang (P3A/GP3A)	Terlaksananya Pemberdayaan Keujeun Blang (P3A/GP3A)	0 0					150	150	150
	Kegiatan Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Terlaksananya Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	0 0					3	3	3
	Kegiatan Pembiayaan Pertanian	terlaksananya Pembiayaan Pertanian	0 0					2	2	2
2.00.03.2.00.03.01.25	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI									
2.00.03.2.00.03.01.25.001	Kegiatan Perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan	23 Kab	23	23	23	100	23	23	100
2.00.03.2.00.03.01.25.003	Kegiatan Perencanaan pembangunan perkebunan	Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan	23 Kab	23	23	23	100	23	23	100
2.00.03.2.00.03.01.25.005	Kegiatan Monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian TPH	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian TPH	23 Kab		23	23	100	23	23	100
2.00.03.2.00.03.01.25.006	Kegiatan Penyusunan data statistik dan informasi pertanian TPH	Terlaksananya Penyusunan data statistik dan informasi pertanian TPH	23 Kab		23	23	100	23	23	100
2.00.03.2.00.03.01.25.007	Kegiatan Monitoring dan evaluasi pembangunan perkebunan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pembangunan	23 Kab		23	23	100	23	23	100
2.00.03.2.00.03.01.25.008	Kegiatan Penyusunan data statistik dan informasi perkebunan	Terlaksananya Penyusunan data statistik dan informasi	23 Kab		23	23	100	23	23	100
2.00.03.2.00.03.01.28	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENYULUHAN									
2.00.03.2.00.03.01.28.001	Kegiatan Pendidikan bagi penyuluh pertanian	Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan	24 Keg					420	420	17,50
2.00.03.2.00.03.01.28.003	Kegiatan Upgrading Penyuluh Pertanian	Meningkatnya Kuantitas dan Rasio Penyuluh Bersertifikat	750 Org		750	732	97,61			
	Kegiatan Updating Data dan Informasi Penyuluh Pertanian							180	180	180,00
2.00.03.2.00.03.01.28.004	Peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat Pertanian	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat	12 Keg		3	3	96,16	1	4	0,32
2.00.03.2.00.03.01.28.005	Rapat-rapat Koordinasi Penyuluhan	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Penyuluhan	92 Kab							
2.00.03.2.00.03.01.28.006	Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana	100 BPP		25	19	77,39	1	20	0,20
2.00.03.2.00.03.01.28.008	Kegiatan IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Progame) Bidang Pertanian	Terlaksananya IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Progame) Bidang Pertanian	4 Kab					4	4	1,00
2.00.03.2.00.03.01.28.009	Pendidikan kejuruan Pertanian	Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian	3 Unit					3	3	1,00
2.00.03.2.00.03.01.28.010	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	23 Kab		12	12	96,26	120	132	5,72

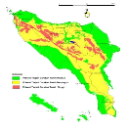


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh. Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan Pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian dan Perkebunan serta Penyuluhan Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas ini diselenggarakan oleh seluruh komponen dalam dinas mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Sub Bagian sampai Kepala Seksi beserta stafnya serta Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Tugas Pokok Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- c. Penyusunan program penyuluhan pengembangan sumber daya tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- d. Penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. Pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan,

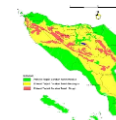


- hortikultura dan perkebunan;
- i. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - j. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - k. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - l. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - m. Pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - n. Pembinaan UPTD; dan
 - o. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanian dan perkebunan.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPA berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berdasarkan indikator kinerja utama yang sudah ditentukan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2017–2022. Analisis Kinerja Pelayanan dapat digambarkan pada tabel T-C.30 sebagai berikut :

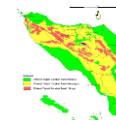
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2021



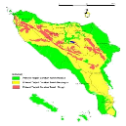
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

No.	Indikator	SPM/Stand	IKK	Satuan	Target Renstra SKPA				Capaian Realisasi		Proyeksi		Hasil Analisis
		Nasional	PP 6 2008		2019 (n-1)	2020 (n)	2021 (n+1)	2022 (n+1)	2019 (n-2)	2020 (n-1)	2021 (n)	2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12	13	14
	Pertanian												
1	Kontribusi Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB			%	6,26	6,18	6,29	6,40	7,00				
2	Kontribusi Sektor Tanaman Hortikultura Terhadap PDRB			%	4,68	4,70	4,85	5,00	4,49				
3	Kontribusi Sektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB			%	7,09	7,28	7,32	7,36	7,59				
4	Kontribusi Produksi Tanaman Pangan												
	- Padi			Ton	2.625.047	2.713.675	2.805.293	2.900.000	2.625.047				
	- Jagung			Ton	383.059	404.188	426.480	450.000	383.059				
	- Kedele			Ton	41.930	42.929	43.952	45.000	41.930				
	- Kacang Tanah			Ton	2.709	2.844	2.986	3.136	2.709				
	- Ubi Kayu			Ton	31.169	33.085	35.118	37.277	31.169				
5	Kontribusi Produktivitas Tanaman Pangan Per Hektar												
	- Padi			Ku/Ha	54,50	55,50	56,70	57,80	54,50				
	- Jagung			Ku/Ha	47,10	48,04	49,00	49,98	47,10				
	- Kedele			Ku/Ha	16,12	16,33	26,74	16,76	16,12				
	- Kacang Tanah			Ku/Ha	14,85	15,59	16,37	17,19	14,85				
	- Ubi Kayu			Ku/Ha	148,60	153,06	157,65	162,38	148,60				
6	Kontribusi Produksi Hortikultura												
	- Bawang Merah			Ton	7.785	8.174	8.583	9.012	7.785				
	- Cabe Merah			Ton	52.613	55.244	58.006	60.906	52.613				
	- Kentang			Ton	72.955	76.603	80.433	84.455	72.955				
	- Jeruk			Ton	7.983	8.382	8.801	9.241	7.983				
	- Pisang			Ton	83.958	88.156	92.564	97.192	83.958				
7	Kontribusi Produktivitas Hortikultura												
	- Bawang Merah			Ton/Ha	9,09	9,10	9,10	9,10	9,09				
	- Cabe Merah			Ton/Ha	10,65	10,65	10,66	10,67	10,65				
	- Kentang			Ton/Ha	23,97	23,98	24,00	24,01	23,97				
	- Jeruk			Ton/Ha	31,39	31,42	31,42	31,44	31,39				
	- Pisang			Ton/Ha	68,65	68,69	68,72	68,76	68,65				

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2021



No.	Indikator	SPM/Stand	IKK	Satuan	Target Renstra SKPA				Capaian Realisasi		Proyeksi		Hasil Analisis
		Nasional	PP 6 2008		2019 (n-1)	2020 (n)	2021 (n+1)	2022 (n+1)	2019 (n-2)	2020 (n-1)	2021 (n)	2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12	13	14
8	Kontribusi Produksi Perkebunan												
	- Kelapa Sawit Rakyat			Ton	554.036	577.828	635.346	693.626	410.411,14				
	- Kelapa			Ton	63.500	64.000	64.500	65.000	63.771,69				
	- Kopi			Ton	65.200	65.300	65.400	65.500	65.902,07				
	- Kakao			Ton	45.000	46.000	46.200	46.800	41.093,06				
	- Karet			Ton	71.900	72.500	73.200	73.500	65.652,43				
	- Pala			Ton	7.000	7.500	8.230	8.500	6.586,02				
	- Lada			Ton	350	355	358	358	358,32				
	- Nilam			Ton	400	450	560	700	224,76				
	- Cengkeh			Ton	5.700	5.800	5.900	6.000	5.512,80				
	- Tembakau			Ton	4.370	4.620	4.870	5.120	2.149,30				
9	Kontribusi Produktivitas Perkebunan												
	- Kelapa Sawit Rakyat			Ton/Ha	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75				
	- Kelapa			Ton/Ha	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82				
	- Kopi			Ton/Ha	0,73	0,73	0,74	0,74	0,74				
	- Kakao			Ton/Ha	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78				
	- Karet			Ton/Ha	0,95	0,95	0,97	0,97	0,97				
	- Pala			Ton/Ha	0,70	0,72	0,75	0,75	0,75				
	- Lada			Ton/Ha	0,76	0,77	0,78	0,78	0,78				
	- Nilam			Ton/Ha	0,36	1,30	1,45	1,50	1,50				
	- Cengkeh			Ton/Ha	0,58	0,59	0,59	0,59	0,59				
10	Cakupan Bina Kelompok Tani			Klp	1.294	1.361	1.450	1.539					
11	Rasio Penyuluh Terakreditasi			%	4,09	4,41	4,72	5,03					
12	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan			%	89,22	93,66	95,30	96,94	91,53				
13	Nilai Tukar Petani Hortikultura			%	104,72	109,64	108,22	109,64	102,30				
14	Nilai Tukar Petani Perkebunan			%	95,58	98,53	107,21	107,21	87,27				



Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2019 mengalami peningkatan terlihat dari jumlah produksi dan produktivitas tanaman padi dan palawija, tercapainya produksi dan produktivitas yang diperoleh sangat terkait dengan penggunaan benih unggul bermutu dan persediaan air cukup, pengendalian hama dan penyakit serta penyaluran pertanian yang efektif sebagai faktor sangat mempengaruhi dalam peningkatan produksi dan produktivitas dalam pengukuran keberhasilan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

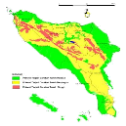
Upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa mendatang adalah dengan;

- a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait untuk memperlancar proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan,
- b. Penetapan CP/CL di kabupaten diharapkan tepat waktu dan secepatnya sebelum jadwal pelelangan ditetapkan, dan
- c. Program/kegiatan pada tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat membuat indikator, sasaran dan target yang direncanakan sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2017-2022 dan Renja Tahun 2021 agar dapat diukur dan diidentifikasi permasalahan dan solusi pemecahannya.

Dari uraian di atas mengenai kinerja pelayanan SKPA tentang Produksi dan Produktivitas hasil Pertanian dan Perkebunan di lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dan pembiayaan yang cukup untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPA.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Pembangunan pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah. peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata pada

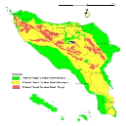


penyediaan bahan pangan, sumber pendapatan serta pelestarian lingkungan melalui penyediaan bahan pangan bagi masyarakat, penyediaan lapangan kerja masyarakat dan kontribusi dalam produk domestik regional bruto (PDRB) daerah.

Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Aceh tahun 2017 – 2022 menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas melalui prioritas program "ketahanan pangan dan nilai tambah hasil pertanian" dan merupakan leading/penggerak untuk sektor-sektor lainnya seperti perdagangan, pengolahan hasil industri basisnya dan penggeraknya ada disektor pertanian, khususnya sub-sektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.

Kendala dan permasalahan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan saat ini seperti, optimalisasi sumber daya lahan pertanian masih rendah, alih fungsi lahan produktif (lahan sawah), akses petani terhadap lahan dan permodalan, lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani serta kinerja penyuluhan pertanian, jaminan pemasaran dan pengolahan hasil serta upaya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan perkebunan yang masih lemah, hal ini mengakibatkan laju pembangunan pertanian khususnya sektor tanaman pangan belum berjalan sesuai harapan.

Pembangunan sektor pertanian dan perkebunan membutuhkan sinergitas pihak terkait, kesamaan persepsi dan sinkronisasi yang kuat, tanpa ini rencana kerja yang sudah disusun dan kita tetapkan pasti akan berjalan tidak sesuai seperti yang kita harapkan, untuk itu pihak kami mengharapkan semua pihak terkait agar dapat melakukan persiapan–persiapan, sinergitas antara pihak terkait pelaksana koordinasi yang inten di daerah masing–masing karena pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pada saat ini ada disektor pertanian dan perkebunan.



Pemerintah pusat melalui kementerian pertanian memprioritaskan Aceh di sektor pertanian dan perkebunan khususnya sektor tanaman pangan, mengingat kontribusi yang besar pada sumber mata pencarian, penyerapan tenaga kerja dan PDRB Aceh dari sektor ini, dan target yang ingin dicapai pada akhir RPJM Aceh tahun 2017-2022 kontribusi aceh untuk penyediaan pangan nasional menjadi 5 - 10 %.

Semua pihak terkait dalam pembangunan pertanian tanaman pangan seperti dinas pengairan, dinas pekerjaan umum, dinas perdagangan, dinas perindustrian, badan urusan logistik, BPS, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Sang Hyang Seri, PT. Pertani dan instansi lainnya, untuk dapat meningkatkan kerjasama dan koordinasi agar pembangunan sektor pertanian yang menjadi andalan daerah bisa berjalan sebagaimana yang telah kita susun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2017 – 2022 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020.

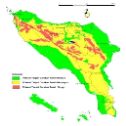
Kebijakan dalam rangka mendukung Prioritas dan sasaran program adalah sebagai berikut :

1. Optimasi Lahan Pertanian dan Perkebunan.

Kegiatan Optimasi Tahan tersebut mencakup kegiatan - kegiatan Pemanfaatan Lahan Tidur (sleeping land), Peningkatan Indek Tanam / Indek Panen, Gerakan Percepatan Tanam Padi (tepat waktu) dan Pengaturan Pola Tanam Spesifik Lokasi serta pemanfaatan lahan-lahan terlantar.

2. Gerakan Peningkatan Mutu Intensifikasi.

Gerakan peningkatan mutu intensifikasi mencakup Kebijakan subsidi benih padi, jagung & kedelai, Pengembangan model SLPTT dan SRI, Pengembangan Model Foods Estate dan Penyediaan Armada Alsintan.



3. Revitalisasi Institusi Perbenihan.

Revitalisasi Institusi Perbenihan mencakup kegiatan Revitalisasi Balai Benih Induk, Revitalisasi Balai Benih Utama dan Revitalisasi Penangkar Benih serta Penumbuhan dan Pengembangan Kebun-kebun Perbibitan Perkebunan.

4. Penguatan Peran UPJA Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penguatan peran UPJA tersebut mencakup Pembentukan Brigade Tanam & Brigade Panen serta pembangunan Workshop Provinsi & Kabupaten Melalui kerjasama dengan produsen Alat & Mesin Pertanian.

5. Penguatan Peran dan Fungsi UPTD.

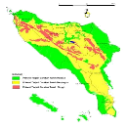
Penguatan Peran dan Fungsi UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan & Hortikultura dan Perkebunan, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Balai Benih Tanaman Pangan, Balai Benih Tanaman Hortikultura, Mekanisasi Pertanian.

6. Koordinasi Penguatan Peran & Fungsi Penyuluhan Pertanian.

Koordinasi penguatan peran dan fungsi penyuluhan pertanian mencakup antara lain Koordinasi Pembenahan Fungsi & Peran Kelompok Tani/Kelembagaan Petani, Koordinasi Penguatan Peran Penyuluhan Pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian.

7. Peningkatan Nilai Tambah & Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan

Peningkatan Nilai Tambah dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan melalui kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen serta Aktif Membantu Kestabilan Harga Produk Pertanian/Perkebunan. Disamping itu upaya-upaya peningkatan mutu Hasil serta pengamanan mutu produk perlu mendapat perhatian khusus agar tidak terjadi pencemaran mutu produk yang berdampak pada penurunan nilai jual produk.



2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPA Tahun 2021 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Review terhadap Rencana Awal RKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2021 antara Rencana Awal RKPA dengan Hasil Analisis Kebutuhan Anggaran dalam rangka pelaksanaan Program/Kegiatan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dari RKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2021 terdapat besaran anggaran sesuai dengan jumlah pagu indikatif rencana awal RKPA adalah sebesar Rp. 223.918.693.469.-

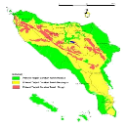
Dari berbagai program dan kegiatan SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh baik Rencana Awal RKPA Tahun 2021 dan Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Indikatif sebesar Rp. 223.918.693.469.- terdiri dari Belanja Tidak Langsung Administrasi Keuangan sebesar Rp. 93.366.276.388.- dengan Target Capaian Kinerja sebanyak 718 ASN, Belanja Langsung sebesar Rp. 130.552.417.081.- dengan target kinerja pelaksanaan sebanyak 5 Program dan 13 Kegiatan, dengan penjelasan hasil analisis besaran pagu indikatif dapat dijelaskan sebagai berikut :

BELANJA PENUNJANG (OPERASIONAL RUTIN KANTOR).

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 1.130.470.000, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

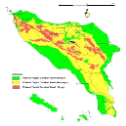


- Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan, indikator sub kegiatan terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan dengan target capaian kinerja di 23 Kabupaten/Kota, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 367.000.000.
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah, indikator sub kegiatan Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan dengan target capaian kinerja 23 Kabupaten/Kota, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 179.090.000.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah, indikator sub kegiatan Terwujudnya sinkronisasi perencanaan berbasis data dan informasi dengan target capaian kinerja 23 Kabupaten/Kota, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 583.480.000.

b. Kegiatan Administrasi Umum.

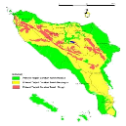
Kegiatan Administrasi Umum merupakan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar 30.746.635.085, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, indikator sub kegiatan Jumlah Surat yang terkirim dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 42.006.000.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator sub kegiatan Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selamasatu tahun dengan target capaian



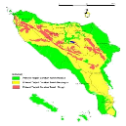
kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 2.741.264.382.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator sub kegiatan Terlaksananya peningkatan perlengkapan dan peralatan kantor dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 600.680.000.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, indikator sub kegiatan Terlaksananya peningkatan perlengkapan dan peralatan kantor dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 4.029.369.537.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, indikator sub kegiatan Jumlah jasa tenaga administrasi/Teknis kegiatan dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 18.048.801.350.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, indikator sub kegiatan Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 311.648.285.
- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, indikator sub kegiatan Terlaksananya penyediaan kebutuhan ATK dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 499.337.647.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, indikator sub kegiatan Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 399.680.569.
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, indikator sub kegiatan Tersedianya kebutuhan



instalasi listrik dan alat penerangan gedung kantor dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 150.000.000.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, indikator sub kegiatan Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 204.000.000.
- Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, indikator sub kegiatan Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum dengan target capaian kinerja 12 bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 537.718.884.
- Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, indikator sub kegiatan Terlaksananya sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi dalam pencapaian kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 779.774.993.
- Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, indikator sub kegiatan Tersedianya perlengkapan gedung kantor dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 600.000.000.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, indikator sub kegiatan Terpeliharanya gedung perkantoran yang merupakan aset daerah dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 540.153.438.
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor, indikator sub kegiatan Terlaksananya rehabilitasi gedung dengan



target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 1.262.200.000.

c. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur merupakan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar 263.764.670, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, indikator sub kegiatan Terciptanya motivasi, sumber daya Aparatur yang profesional dalam pelayanan publik dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 144.725.000.
- Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, indikator sub kegiatan Terlaksananya sosialisasi menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 119.039.670.

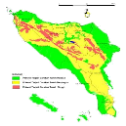
**PROGRAM/KEGIATAN SPESIFIK DINAS PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN.**

I. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Saran Pertanian

Kegiatan Pengawasan Peredaran Saran Pertanian merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar 2.369.008.510, serta rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian, indikator sub kegiatan terlaksananya



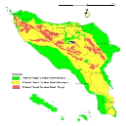
peredaran pupuk bersubsidi dengan target capaian kinerja 3 Kegiatan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 560.000.000.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, indikator sub kegiatan Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan peredaran peralatan mesin pertanian/perkebunan dengan target capaian kinerja 1 Kegiatan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 1.500.007.400.

b. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman.

Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar 72.805.294.821, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih, indikator sub kegiatan Terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan target capaian kinerja 12 Kabupaten/Kota, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 1.012.934.000.
- Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura, indikator sub kegiatan Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura dengan target capaian kinerja 11 Komoditi dan 14 Kegiatan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 37.300.210.821.
- Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan, indikator sub kegiatan Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi (MT Gadu) dengan



target capaian kinerja 22 Kabupaten/Kota, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 8.032.150.000.

- Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan, indikator sub kegiatan Terlaksananya Penyediaan Bibit Unggul Tanaman tahunan dan penyegar dengan target capaian kinerja 5 Komoditi, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 26.460.000.000.-

- c. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi.

Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar 1.000.000.000, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

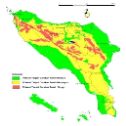
- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme, indikator sub kegiatan Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan dengan target capaian kinerja 3 Komoditi, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 1.000.000.000.

II. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

- a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian.

Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar 740.000.000, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani, indikator sub kegiatan



Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian dengan target capaian kinerja 3 Kegiatan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 218.000.000.

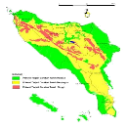
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani, indikator sub kegiatan Terlaksananya Pemberdayaan Keujruen Blang (P3A/GP3A) dengan target capaian kinerja 20 Kabupaten/Kota, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 300.000.000.
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya, indikator sub kegiatan Terlaksananya optimasi lahan pertanian Terlaksananya Perluasan Areal Pertanian dengan target capaian kinerja 20 Kabupaten/Kota, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 222.000.000.

III. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

- a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi.

Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar 1.500.000.000, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, indikator sub kegiatan Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu tanaman dengan target capaian kinerja 14 Kegiatan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 1.500.000.000.-



IV. Program Perizinan Usaha Pertanian.

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar 1.350.000.000, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

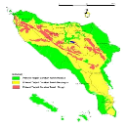
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian, indikator sub kegiatan Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar dengan target capaian kinerja 20 Kabupaten/Kota, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 1.350.000.000.

V. Program Penyuluhan Pertanian.

- a. Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian.

Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar 400.000.000, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta, indikator sub kegiatan Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan target capaian kinerja 6 Kegiatan serta 28 Kelas, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 400.000.000.-



b. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian.

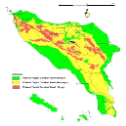
Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar 8.670.000.166, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian, indikator sub kegiatan Tersedianya produk hasil Perkebunan yang memiliki nilai tambah dengan target capaian kinerja 23 Kabupaten/Kota, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 670.000.000.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani, indikator sub kegiatan Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan target capaian kinerja 28 Kelas, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 8.000.000.000.

c. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar 8.886.244.939, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani, indikator sub kegiatan Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani dengan target capaian kinerja 7 Kegiatan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 2.999.995.000.



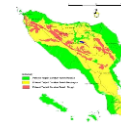
- Sub Kegiatan Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani, indikator sub kegiatan Terlaksananya IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Programe) Bidang Pertanian dengan target capaian kinerja 7 Kegiatan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 200.000.000.
- Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani, indikator sub kegiatan Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian dengan target capaian kinerja 7 Kegiatan dan 3 SMKPP Aceh, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 6.686.249.939.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara lengkap dan rinci pada Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA serta Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Indikatif Tahun 2021, sebagai berikut :

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2021



Tabel T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021

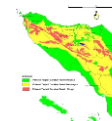
Nama SKPA : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		Catatan Penting\
						TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					223.918.693.469		223.918.693.469	
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					125.507.146.143		125.507.146.143	
01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan		1.130.470.000		1.130.470.000	
02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Banda Aceh	Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan	12 Bln	367.900.000	12 Bln	367.900.000	
03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Banda Aceh	Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan	12 Bln	179.090.000	12 Bln	179.090.000	
04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Banda Aceh	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan berbasis data dan informasi	12 Bln	583.480.000	12 Bln	583.480.000	
02 Administrasi Keuangan					93.366.276.388		93.366.276.388	
02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	Terlaksananya pembayaran gaji dan hak- hak pegawai	718 Org	93.366.276.388	718 Org	93.366.276.388	
03 Administrasi Umum					30.746.635.085		30.746.635.085	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banda Aceh	Jumlah Surat yang terkirim	12 Bln	42.006.000	12 Bln	42.006.000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banda Aceh	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selamasatu tahun	12 Bln	2.741.264.382	12 Bln	2.741.264.382	
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banda Aceh	Terlaksananya peningkatan perlengkapan dan peralatan kantor	12 Bln	600.680.000	12 Bln	600.680.000	
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Banda Aceh	Terlaksananya peningkatan perlengkapan dan peralatan kantor	12 Bln	4.029.369.537	12 Bln	4.029.369.537	
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Banda Aceh	Jumlah jasa tenaga administrasi/Teknis kegiatan	12 Bln	18.048.801.350	12 Bln	18.048.801.350	
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Banda Aceh	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan	12 Bln	311.648.285	12 Bln	311.648.285	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Banda Aceh	Terlaksananya penyediaan kebutuhan ATK	12 Bln	499.337.647	12 Bln	499.337.647	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banda Aceh	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan	12 Bln	399.680.569	12 Bln	399.680.569	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banda Aceh	Tersedianya kebutuhan instalasi listrik dan alat penerangan gedung kantor	12 Bln	150.000.000	12 Bln	150.000.000	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banda Aceh	Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan	12 Bln	204.000.000	12 Bln	204.000.000	
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Banda Aceh	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum	12 Bln	537.718.884	12 Bln	537.718.884	
18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Banda Aceh	Terlaksananya sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi dalam pencapaian kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran	12 Bln	779.774.993	12 Bln	779.774.993	
23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Banda Aceh	tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 Bln	600.000.000	12 Bln	600.000.000	
29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Banda Aceh	Terpeliharanya gedung perkantoran yang merupakan aset daerah	12 Bln	540.153.438	12 Bln	540.153.438	
39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Banda Aceh	Terlaksananya rehabilitasi gedung	12 Bln	1.262.200.000	12 Bln	1.262.200.000	
04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					263.764.670		263.764.670	
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Banda Aceh	Terciptanya kesegamaan identitas dan disiplin pegawai Dinas	12 Bln	0	12 Bln	0	
09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Banda Aceh	Terciptanya motivasi, sumber daya Aparatur yang profesional dalam pelayanan publik	12 Bln	144.725.000	12 Bln	144.725.000	
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Banda Aceh	Terlaksananya sosialisasi menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	12 Bln	119.039.670	12 Bln	119.039.670	

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2021

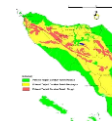


No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		Catatan Penting\
						TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					223.918.693.469		223.918.693.469	
URUSAN PERTANIAN					98.411.547.326		98.411.547.326	
2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					75.865.302.221		75.865.302.221	
01	Pengawasan Peredaran Saran Pertanian		Terawasinya distribusi pupuk bersubsidi, pestisida dan Alat mesin pertanian		2.060.007.400		2.060.007.400	
01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Banda Aceh	Terlaksananya peredaran pupuk bersubsidi	12 Bln	560.000.000	12 Bln	560.000.000	
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Banda Aceh	Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan peredaran peralatan mesin pertanian/perkebunan	12 Bln	1.500.007.400	12 Bln	1.500.007.400	
02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Tersedianya Sertifikat Benih Unggul Pertanian		72.805.294.821		72.805.294.821	
01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura	22 Kab/Kota	1.012.934.000	22 Kab/Kota	1.012.934.000	
02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Hortikultura Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu tanaman	11 Komoditi 14 Keg	37.300.210.821	11 Komoditi 14 Keg	37.300.210.821	
03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Banda Aceh	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi (MT Gadu).	22 Kab	8.032.150.000	22 Kab	8.032.150.000	
04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Banda Aceh	Terlaksananya Penyediaan Bibit Unggul Tanaman tahunan dan penyebar	5 Komoditi	26.460.000.000	5 Komoditi	26.460.000.000	
03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Tersedianya Benih Sumber Bermutu		1.000.000.000		1.000.000.000	
04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan	3 Komoditi	1.000.000.000	3 Komoditi	1.000.000.000	
3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					740.000.000		740.000.000	
03	Penataan Prasarana Pertanian		Tersedianya Prasarana Pertanian		740.000.000		740.000.000	
03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian	3 Keg	218.000.000	3 Keg	218.000.000	
04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Kejuruan Blang (P3A/GP3A)	20 kab/ kota	300.000.000	20 kab/ kota	300.000.000	
09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kabupaten/Kota	Terlaksananya optimasi lahan pertanian Terlaksananya Perluasan Areal Pertanian	20 kab/ kota	222.000.000	20 kab/ kota	222.000.000	
4 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					1.500.000.000		1.500.000.000	
01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Terkendaliaanya Serangan Organisme Pengganggu tanaman		1.500.000.000		1.500.000.000	
01.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu tanaman	14 Keg	1.500.000.000	14 Keg	1.500.000.000	
5 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					1.350.000.000		1.350.000.000	
01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terbina dan terawasinya usaha perkebunan besar		1.350.000.000		1.350.000.000	
01.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar	20 kab/ kota	1.350.000.000	20 kab/ kota	1.350.000.000	

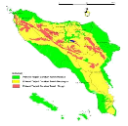
RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2021



No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		Catatan Penting\
						TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					223.918.693.469		223.918.693.469	
URUSAN PERTANIAN					98.411.547.326		98.411.547.326	
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				18.956.245.105		18.956.245.105	
01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Tersedianya tenaga penyuluh yang inovatif dan informatif		400.000.000		400.000.000	
01.	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan	6 Keg	0	6 Keg	0	
02.	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	6 Keg 28 Kls	400.000.000	6 Keg 28 Kls	400.000.000	
02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Tersedianya hasil penyuluhan penerapan praktek pertanian		8.670.000.166		8.670.000.166	
01.	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kabupaten/Kota	Tersedianya produk hasil Perkebunan yang memiliki nilai tambah Tersedianya produk hasil pertanian yang memiliki nilai tambah	23 Kab/Kota	670.000.000	23 Kab/Kota	670.000.000	
02.	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	28 Kelas	8.000.000.166	28 Kelas	8.000.000.166	
03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Meningkatnya Kelembagaan dan SDM Petani		9.886.244.939		9.886.244.939	
01.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	7 Keg	2.999.995.000	7 Keg	2.999.995.000	
02.	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Kabupaten/Kota	Terlaksananya IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Programe) Bidang Pertanian Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	7 Keg	200.000.000	7 Keg	200.000.000	
04.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian	SMK PP	6.686.249.939	SMK PP	6.686.249.939	



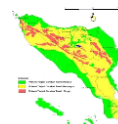
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Program dan kegiatan diusulkan oleh bidang-bidang berdasarkan analisis kebutuhan Dinas Pertanian dan Perkebunan terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPA sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Berikut disajikan dalam Tabel T-C.32 usulan program dan kegiatan.

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2021



Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

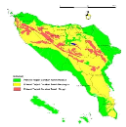
Nama SKPA : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	BESARAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan			
02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan	Banda Aceh	12 Bln	
03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan	Banda Aceh	12 Bln	
04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan berbasis data dan informasi	Banda Aceh	12 Bln	
02	Administrasi Keuangan	Terlaksananya pelayanan perkantoran			
02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan hak-hak pegawai	Banda Aceh	718 Org	
03	Administrasi Umum	Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan kantor			
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	Banda Aceh	12 Bln	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik seluas tahun	Banda Aceh	12 Bln	
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya peningkatan perlengkapan dan peralatan kantor	Banda Aceh	12 Bln	
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya peningkatan perlengkapan dan peralatan kantor	Banda Aceh	12 Bln	
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa tenaga administrasi/Teknis kegiatan	Banda Aceh	12 Bln	
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan	Banda Aceh	12 Bln	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan kebutuhan ATK	Banda Aceh	12 Bln	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan	Banda Aceh	12 Bln	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan instalasi listrik dan alat penerangan gedung kantor	Banda Aceh	12 Bln	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan	Banda Aceh	12 Bln	
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum	Banda Aceh	12 Bln	
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi dalam pencapaian kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran	Banda Aceh	12 Bln	
23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	Banda Aceh	12 Bln	
29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung perkantoran yang merupakan aset daerah	Banda Aceh	12 Bln	
39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung	Banda Aceh	12 Bln	
04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan publik			
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terciptanya kesegamaan identitas dan disiplin pegawai Dinas	Banda Aceh	12 Bln	
09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terciptanya motivasi, sumber daya Aparatur yang profesional dalam pelayanan publik	Banda Aceh	12 Bln	
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Banda Aceh	12 Bln	
URUSAN PERTANIAN					
2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
01	Pengawasan Peredaran Saran Pertanian	Terawasnya distribusi pupuk bersubsidi, pestisida dan Alat mesin pertanian			
01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya peredaran pupuk bersubsidi	Banda Aceh	12 Bln	
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan peredaran peralatan mesin pertanian/perkebunan	Banda Aceh	12 Bln	
02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Sertifikat Benih Unggul Pertanian			
01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kabupaten/Kota	22 Kab/Kota	
02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Hortikultura Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu tanaman	Kabupaten/Kota	11 Komoditi 14 Keg	
03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi (MT Gadu).	Banda Aceh	22 Kab	
04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Terlaksananya Penyediaan Bibit Unggul Tanaman tahunan dan penyebar	Banda Aceh	5 Komoditi	

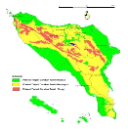
RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2021



No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	BESARAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Tersedianya Benih Sumber Bermutu			
04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan	Kabupaten/Kota	3 Komoditi	
3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
03	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian			
03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian	Kabupaten/Kota	3 Keg	
04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Terlaksananya Pemberdayaan Kejujren Blang (P3A/GP3A)	Kabupaten/Kota	20 kab/ kota	
09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terlaksananya optimasi lahan pertanian Terlaksananya Perluasan Areal Pertanian	Kabupaten/Kota	20 kab/ kota	
4 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terkendalinya Serangan Organisme Pengganggu tanaman			
01.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu tanaman	Kabupaten/Kota	14 Keg	
5 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbina dan terawasinya usaha perkebunan besar			
01.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar	Kabupaten/Kota	20 kab/ kota	
6 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Tersedianya tenaga penyuluh yang inovatif dan informatif			
01.	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Kabupaten/Kota	6 Keg	
02.	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	Kabupaten/Kota	6 Keg 28 Kls	
02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Tersedianya hasil penyuluhan penerapan praktek pertanian			
01.	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Tersedianya produk hasil Perkebunan yang memiliki nilai tambah Tersedianya produk hasil pertanian yang memiliki nilai tambah	Kabupaten/Kota	23 Kab/Kota	
02.	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Kabupaten/Kota	28 Kelas	
03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Meningkatnya Kelembagaan dan SDM Petani			
01.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	Kabupaten/Kota	7 Keg	
02.	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Terlaksananya IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Programme) Bidang Pertanian Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	Kabupaten/Kota	7 Keg	
04.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian	Kabupaten/Kota	SMK PP	

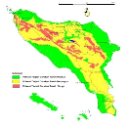


BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020 - 2024, sektor pertanian diberikan mandat pada agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai penerjemahan visi ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***, maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Pertanian maju, mandiri dan modern akan mengarahkan kepada kondisi bangsa yang mampu memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pencapaian ketahanan pangan diarahkan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk pangan yang beranekaragam dengan menerapkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif, efisiensi dan daya saing. Pengembangan sistem pola integrasi diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan. Peningkatan produksi pangan haruslah mampu meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Ketahanan pangan yang ingin diwujudkan juga memerhatikan kualitas pangan yang bergizi, beragam dan berimbang. Kebijakan untuk pangan diarahkan kepada menyediakan pangan yang cukup, bergizi, sehat, beragam, halal, ramah lingkungan dan bercita rasa bagi semua. Kebijakan pangan juga



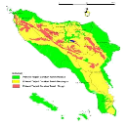
diarahkan kepada pembangunan berbasis kewilayahan guna mengurangi ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah yang merupakan dampak dari terpusatnya distribusi dan alokasi serta pemanfaatan sumber daya di wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus. Oleh karena itu, pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus merupakan solusi dalam mengurangi ketidakseimbangan antar wilayah.

3.1.1. Arah Kebijakan Kementerian Pertanian

Memerhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Terjaganya ketahanan pangan nasional
- b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
- c. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian
- d. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dane.Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Arah kebijakan tersebut dijelaskan melalui strategi dan upaya-upaya pelaksanaan melalui program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian.

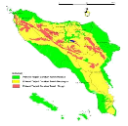


3.1.2. Strategi Kementerian Pertanian

Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa ekspansi ke luar wilayah pusat-pusat pertanian yang ada selama ini. Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian juga akan mendorong peningkatan produksi usaha tani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian.

Untuk menjawab tantangan agar komoditas pertanian Indonesia dapat bersaing di pasar domestik maupun global maka kegiatan mekanisasi pertanian perlu dilakukan dari industri hulu, onfarm, dan industri hilir sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha pertanian.

Fokus strategi Kementerian Pertanian selanjutnya yaitu kegiatan research and development (R&D) dan inovasi pertanian yang lebih komprehensif lagi yang tidak hanya dilakukan dalam upaya meningkatkan produktivitas (yield) tetapi perlu diprioritaskan kepada penciptaan teknologi dan inovasi untuk menurunkan biaya produksi, peningkatan kualitas dan menurunkan biaya distribusi dan pemasaran (biaya logistik). Apabila dijabarkan lebih lanjut dalam setiap arah kebijakan maka strategi dari masing-masing kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :



a. Strategi untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional

Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya ketahanan pangan nasional adalah stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah serta distribusi pangan yang lancar. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan di antaranya :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian
2. Peningkatan ketersediaan pangan
3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan

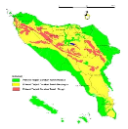
b. Strategi dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian

Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi penciptaan nilai tambah dan akses pasar banyak dikuasai pada usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu meningkatkan sinergitas yang tinggi dengan sektor industri dan perdagangan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Adapun strategi yang dilakukan dari sisi pembangunan pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan nilai tambah
2. Peningkatan daya saing pertanian

c. Strategi dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian serta Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian

Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin



pertanian. Adapun strategi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air
2. Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida
4. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian

d. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pertanian

Pengembangan SDM yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. SDM yang andal dan profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian adalah sebagai berikut :

1. Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian
2. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian
3. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi
4. Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional
5. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi
6. Penguatan kelembagaan petani

3.1.3. Program Kementerian Pertanian

Pada awal tahun 2020, Kementerian Keuangan menginisiasi perancangan kembali (redesign) penyederhanaan program di masing-masing Kementerian/Lembaga. Dengan adanya perancangan kembali (redesign) tersebut maka sistem penganggaran dan Program Indikatif Kementerian Pertanian pada tahun 2021-2024 akan berubah menjadi :

a. Dukungan Manajemen

Sasaran Program sebagai berikut :

- Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
- Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas
- Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementan
- Meningkatnya kualitas pengawasan internal
- Meningkatnya maturitas SPIP

b. Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

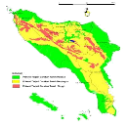
- Termanfaatkannya teknologi dan inovasi pertanian

c. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

- Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan pertanian

d. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

- Meningkatnya ketersediaan pangan strategis
- Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen pertanian yang sesuai dengan kebutuhan
- Terjaminnya keamanan dan mutu pangan
- Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI sektor pertanian
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang sesuai kebutuhan



- Meningkatnya lembaga distribusi pangan yang mandiri
- Meningkatnya penanganan kerawanan pangan
- Meningkatnya pengawasan pangan segar yang beredar
- Aman dari ancaman Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan keamanan hayati
- Tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien

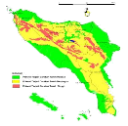
e. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

- Meningkatnya daya saing komoditas pertanian
- Meningkatnya Pertumbuhan ekspor pertanian

Pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pembangunan pertanian, serta pencapaian target sasaran utama membutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi pendanaan secara tepat sasaran, serta penggunaan dana yang efektif dan efisien.

Pendanaan pembangunan pertanian berasal dari pemerintah pusat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN) dan dari sumber lain yaitu:

- a. Pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- b. Swasta, BUMN, dan BUMD;
- c. Investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA);
- d. Lembaga keuangan dan perbankan (skema kredit dan kredit komersial); dan
- e. Swadaya masyarakat.



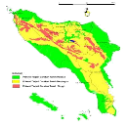
Sumber dana pembangunan pertanian tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat karena besarnya nilai dana yang dibutuhkan. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pertanian sangatlah besar. Sebagian besar merupakan pembiayaan bersumber dari swasta, perbankan dan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Tahun 2021.

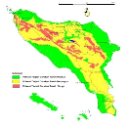
Tujuan dan Sasaran adalah tahapan untuk Perumusan Sasaran Strategis yang menunjukkan Tingkat Prioritas Tertinggi dan Utama dalam Perencanaan Pembangunan berupa Rencana Kerja Program/Kegiatan baik jangka menengah daerah maupun program/kegiatan setiap tahun berjalan terutama pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh selama 1 (satu) tahun, yakni yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata berupa peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta meningkatkan peran penyuluhan pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta membuka peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Untuk mendukung Program Prioritas Pemerintah Aceh yang telah ditetapkan melalui SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, maka tujuan Rencana Kerja (Renja) dalam rangka Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Aceh yang ingin dicapai pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Lanjutan mewujudkan *Good Government* dilingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, efektivitas *pengawasan* kinerja untuk pelayanan publik.



- b. Meningkatkan sistem distribusi sarana produksi (Saprodi) dan hasil panen agar memenuhi kaidah 6 (enam) Tepat, tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat tempat dan tepat guna. Sehingga upaya penambahan luas areal penanaman, meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dapat dicapai.
- c. Meningkatkan mutu hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pengembangan pemasaran hasil produk pertanian unggulan daerah melalui penelitian, pelatihan, promosi di tingkat Daerah, Nasional dan Luar Negeri dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan penerapan prasarana dan sarana teknologi pertanian tepat guna dalam rangka peningkatan infrastruktur dan modernisasi pertanian perkebunan.
- e. Menumbuhkembangkan dan memantapkan sentra-sentra agribisnis sehingga membentuk kawasan komoditas spesifik lokasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berbasis korporasi.
- f. Peningkatan sistem peramalan, pengkajian, pengendalian dalam rangka penanggulangan organisme pengganggu tanaman pertanian dan perkebunan.
- g. Penguatan UPJA Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan membentuk brigade olah tanah, brigade tanam dan brigade panen serta pola kerja sama pengelolaan alsintan menuju modernisasi pertanian dan mewujudkan pola tanam serentak serta luas tambah tanam.
- h. Penguatan Kelembagaan Petani dan Penyuluhan melalui Peningkatan Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Peningkatan Akreditasi Penyuluh Pertanian Lapangan.

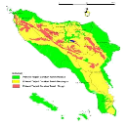


- i. Penguatan Peran dan Fungsi UPTD Lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
- j. Penguatan Institusi Perbenihan Balai Benih Induk, Balai Benih Utama, Kebun-kebun induk perkebunan di sentra dan kawasan komoditas pertanian dan perkebunan serta menumbuh-kembangkan desa-desa mandiri benih dalam rangka kemandirian benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- k. Membuka peluang kerjasama integrasi lintas sektor guna menghadirkan koorporasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan nilai tambah, pendapatan dan kemandirian petani.

3.3. Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2021 dan Perkiraan maju Tahun 2022.

Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam rangka mendukung Program Prioritas Pemerintah Aceh Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dibuat sebagai jabaran dari tujuan secara terukur dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Adapun sasaran yang ingin di capai berdasarkan tugas fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh secara garis besar meliputi :

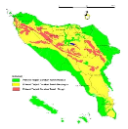
- a. Terarahnya Tata Kelola Organisasi yang efektif, transparan akuntabel dan bersih dalam proses percepatan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik.
- b. Terlaksananya kegiatan penyediaan data dan informasi, Penyusunan Program secara terkoordinasi dan sinkronisasi, tersedianya dokumen pelaporan/evaluasi hasil pelaksanaan Program/Kegiatan.
- c. Terbentuknya Kawasan dan Sentra Agribisnis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Spesifik Lokasi Berbasis Korporasi.



- d. Terlaksananya Penelitian, Pelatihan dan Pengembangan Pemasaran dan Hasil Produk Pertanian Unggulan Daerah Nasional dan Internasional.
- e. Tersedianya Prasarana dan Sarana Teknologi Pertanian Tepat Guna Berupa Peningkatan Infrastruktur Pertanian dan Perkebunan serta Alat Mesin Pertanian (Alsintan) untuk kawasan sentra agribisnis dan daerah potensial.
- f. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di sentra dan kawasan komoditas, melalui Penyediaan Saprodi, Peramalan, Penanggulangan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pertanian dan Perkebunan.
- g. Meningkatnya peran penyuluhan pertanian melalui peningkatan kapasitas SDM penyuluh pertanian dalam rangka membina dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan petani dalam mengelola usahatani.
- h. Meningkatnya Peran UPJA Provinsi dan Kabupaten/kota dalam mendukung Program Modernisasi Pertanian dan Peningkatan Produksi Hasil Pertanian dan Perkebunan.
- i. Terbentuknya kawasan mandiri berbasis keunggulan komoditas pertanian dan perkebunan.

A. PROGRAM DAN KEGIATAN.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017 – 2022. Program Spesifik SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**, serta penyesuaian sebagaimana yang tercantum dalam RPJMA dan RENSTRA Perbaikan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terdiri dari :



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
5. Program Penyuluhan Pertanian;

Adapun Hasil Analisis Pagu Indikatif Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 223.918.693.469,- Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 257.506.497.489,-. Rincian Rencana Program/Kegiatan Tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2022, sebagai berikut :

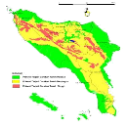
URUSAN PEMERINTAH DAERA (GAJI & TUNJANGAN, RUTIN).

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 1.130.470.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 1.300.040.500, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan, indikator sub kegiatan terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan dengan target capaian kinerja di 23 Kabupaten/Kota, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 367.000.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 423.085.000 dengan target capaian 12 Bulan dan 23 Kabupaten kota.

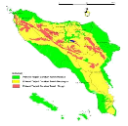


- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah, indikator sub kegiatan Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan dengan target capaian kinerja 23 Kabupaten/Kota, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 179.090.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 205.953.500 dengan target capaian 12 Bulan dan 23 Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah, indikator sub kegiatan Terwujudnya sinkronisasi perencanaan berbasis data dan informasi dengan target capaian kinerja 23 Kabupaten/Kota, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 583.480.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 671..002.000 dengan target capaian 12 Bulan dan 23 Kabupaten/Kota.

b. Kegiatan Administrasi Umum.

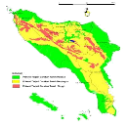
Kegiatan Administrasi Umum merupakan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar 30.746.635.085 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 35.358.630.348, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, indikator sub kegiatan Jumlah Surat yang terkirim dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 42.006.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 48.306.900 dengan target capaian 12 Bulan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator sub kegiatan Jumlah rekening jasa komunikasi,

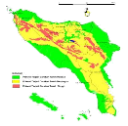


sumber daya air dan listrik selamasatu tahun dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 2.741.264.382 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 3.152.454.039 dengan target capaian 12 Bulan.

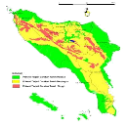
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator sub kegiatan Terlaksananya peningkatan perlengkapan dan peralatan kantor dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 600.680.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 690.782.000 dengan target capaian 12 Bulan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, indikator sub kegiatan Terlaksananya peningkatan perlengkapan dan peralatan kantor dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 4.029.369.537 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 4.633.774.968 dengan target capaian 12 Bulan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, indikator sub kegiatan Jumlah jasa tenaga administrasi/Teknis kegiatan dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 18.048.801.350 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 20.756.121.552 dengan target capaian 12 Bulan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, indikator sub kegiatan Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 311.648.285 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 358.395.528 dengan target capaian 12 Bulan.



- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, indikator sub kegiatan Terlaksananya penyediaan kebutuhan ATK dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 499.337.647 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 574.238.294 dengan target capaian 12 bulan (Sekretariat, 5 Bidang, 4 UPTD dan 3 SMKPP).
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, indikator sub kegiatan Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 399.680.569 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 459.632.654 dengan target capaian 12 Bulan (Sekretariat, 5 Bidang, 4 UPTD dan 3 SMKPP).
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, indikator sub kegiatan Tersedianya kebutuhan instalasi listri dan alat penerangan gedung kantor dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 150.000.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 172.500.000 dengan target capaian 12 Bulan (Sekretariat, 5 Bidang, 4 UPTD dan 3 SMKPP).
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, indikator sub kegiatan Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 204.000.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 234.600.000 dengan target capaian 12 Bulan (Sekretariat, 5 Bidang, 4 UPTD dan 3 SMKPP).



- Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, indikator sub kegiatan Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum dengan target capaian kinerja 12 bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 537.718.884 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 618.3767.17 dengan target capaian 12 Bulan (Sekretariat, 5 Bidang, 4 UPTD dan 3 SMKPP).
- Sub Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, indikator sub kegiatan Terlaksananya sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi dalam pencapaian kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 779.774.993 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 896.741.242 dengan target capaian 12 Bulan (Sekretariat, 5 Bidang, 4 UPTD dan 3 SMKPP).
- Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, indikator sub kegiatan Tersedianya perlengkapan gedung kantor dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 600.000.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 690.000.000 dengan target capaian 12 Bulan (Sekretariat, 5 Bidang, 4 UPTD dan 3 SMKPP).
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, indikator sub kegiatan Terpeliharanya gedung perkantoran yang merupakan aset daerah dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 540.153.438 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 621.176.454 dengan target capaian 12 Bulan (Sekretariat, 5 Bidang, 4 UPTD dan 3 SMKPP).
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor, indikator sub kegiatan Terlaksananya rehabilitasi gedung dengan

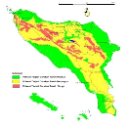


target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 1.262.200.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 1.451.530.000 dengan target capaian 12 Bulan (Sekretariat, 5 Bidang, 4 UPTD dan 3 SMKPP).

c. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur merupakan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar 263.764.670 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 303.329.370, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, indikator sub kegiatan Terciptanya motivasi, sumber daya Aparatur yang profesional dalam pelayanan publik dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 144.725.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 166.433.750 dengan target capaian 12 Bulan.
- Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, indikator sub kegiatan Terlaksananya sosialisasi menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan target capaian kinerja 12 Bulan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 119.039.670 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 136.895.620 dengan target capaian 12 Bulan.



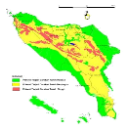
**PROGRAM/KEGIATAN SPESIFIK DINAS PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN.**

I. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Saran Pertanian

Kegiatan Pengawasan Peredaran Saran Pertanian merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar 2.060.007.400 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 2.369.008.510, serta rincian sub kegiatan sebagai berikut :

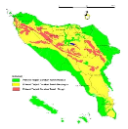
- Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian, indikator sub kegiatan erlaksananya peredaran pupuk bersubsidi dengan target capaian kinerja 3 Kegiatan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 560.000.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 644.00.0000 dengan target capaian 12 Bulan dan 3 Kegiatan.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, indikator sub kegiatan Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan peredaran peralatan mesin pertanian/perkebunan dengan target capaian kinerja 1 Kegiatan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 1.500.007.400 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 1.725.008.510 dengan target capaian 1 Kegiatan 12 Bulan.



b. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman.

Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar 72.805.294.821 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 83.726.089.044, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih, indikator sub kegiatan Terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan target capaian kinerja 12 Kabupaten/Kota, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 1.012.934.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 1.164.874.100 dengan target capaian 22 Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura, indikator sub kegiatan Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura dengan target capaian kinerja 11 Komoditi dan 14 Kegiatan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 37.300.210.821 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 42.895.242.444 dengan target capaian 11 Komoditi dan 14 Kegiatan.
- Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan, indikator sub kegiatan Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi (MT Gadu) dengan target capaian kinerja 22 Kabupaten/Kota, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 8.032.150.000 pada Tahun 2021. Sedangkan



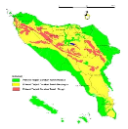
pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 9.236.972.500 dengan target capaian 22 Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan, indikator sub kegiatan Terlaksananya Penyediaan Bibit Unggul Tanaman tahunan dan penyegar dengan target capaian kinerja 5 Komoditi, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 26.460.000.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 30.429.000.000 dengan target capaian 3 Komoditi.

- c. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi.

Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar 1.000.000.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 1.150.000.000, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme, indikator sub kegiatan Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan dengan target capaian kinerja 3 Komoditi, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 1.000.000.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 1.150.000.000 dengan target capaian 3 Komoditi.

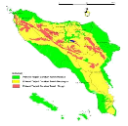


II. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian.

Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar 740.000.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 851.000.000, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani, indikator sub kegiatan Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian dengan target capaian kinerja 3 Kegiatan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 218.000.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 250.700.000 dengan target capaian 3 Kegiatan.
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani, indikator sub kegiatan Terlaksananya Pemberdayaan Keujruen Blang (P3A/GP3A) dengan target capaian kinerja 20 Kabupaten/Kota, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 300.000.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 345.000.000 dengan target capaian 20 Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya, indikator sub kegiatan Terlaksananya optimasi lahan pertanian Terlaksananya Perluasan Areal Pertanian dengan target capaian kinerja 20 Kabupaten/Kota, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 222.000.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun



2022 sebesar Rp. 255.300.000 dengan target capaian 20 Kabupaten/Kota.

III. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

- a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi.

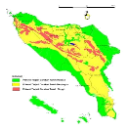
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar 1.500.000.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 1.725.000.000, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, indikator sub kegiatan Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu tanaman dengan target capaian kinerja 14 Kegiatan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 1.500.000.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 1.725.000.000 dengan target capaian 14 Kegiatan.

IV. Program Perizinan Usaha Pertanian.

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar 1.350.000.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan



maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 1.552.500.000, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

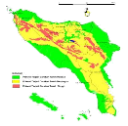
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian, indikator sub kegiatan Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar dengan target capaian kinerja 20 Kabupaten/Kota, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 1.350.000.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 1.552.500.000 dengan target capaian 20 Kabupaten/Kota.

V. Program Penyuluhan Pertanian.

a. Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian.

Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar 400.000.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 460.000.000, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta, indikator sub kegiatan Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan target capaian kinerja 6 Kegiatan serta 28 Kelas, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 400.000.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 460.000.000 dengan target capaian 6 Kegiatan serta 28 Kelas.



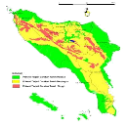
b. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian.

Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar 8.670.000.166 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 9.970.500.191, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian, indikator sub kegiatan Tersedianya produk hasil Perkebunan yang memiliki nilai tambah dengan target capaian kinerja 23 Kabupaten/Kota, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 670.000.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 770.500.000 dengan target capaian 23 Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani, indikator sub kegiatan Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan target capaian kinerja 28 Kelas, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 8.000.000.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 9.200.000.191 dengan target capaian 28 Kelas.

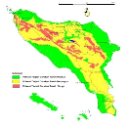
c. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar 8.886.244.939 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan



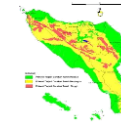
maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 11.369.181.680, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani, indikator sub kegiatan Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani dengan target capaian kinerja 7 Kegiatan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 2.999.995.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 3.449.994.250 dengan target capaian 7 Kegiatan.
- Sub Kegiatan Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani, indikator sub kegiatan Terlaksananya IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Programe) Bidang Pertanian dengan target capaian kinerja 7 Kegiatan, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 200.000.000 pada Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 230.000.000 dengan target capaian 7 Kegiatan.
- Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani, indikator sub kegiatan Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian dengan target capaian kinerja 7 Kegiatan dan 3 SMKPP Aceh, serta besaran perkiraan pagu indikatif Rp. 6.686.249.939 Tahun 2021. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2022 sebesar Rp. 7.689.187.430 dengan target capaian 7 Kegiatan dan 3 SMKPP.



Dari berbagai Program dan Kegiatan SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh baik Rencana Awal RKPA Tahun 2021 maupun Rencana Maju RKPA Tahun 2022 untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara lengkap dan rinci pada *Tabel T-C.33 berikut :*

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2021



Tabel T-C. 33
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022

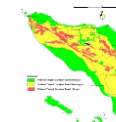
Nama SKPA : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					223.918.693.469				257.506.497.489
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					125.507.146.143				144.333.218.064
01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan			1.130.470.000				1.300.040.500
02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan	Banda Aceh	12 Bln	367.900.000			12 Bln	423.085.000
03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan	Banda Aceh	12 Bln	179.090.000	APBA		12 Bln	205.953.500
04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan berbasis data dan informasi	Banda Aceh	12 Bln	583.480.000	APBA		12 Bln	671.002.000
02	Administrasi Keuangan	Terlaksananya pelayanan perkantoran			93.366.276.388				107.371.217.846
02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan hak-hak pegawai	Banda Aceh	12 Bln	93.366.276.388	APBA		12 Bln	107.371.217.846
03	Administrasi Umum	Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan kantor			30.746.635.085				35.358.630.348
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	Banda Aceh	12 Bln	42.006.000			12 Bln	48.306.900
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik seluas satu tahun	Banda Aceh	12 Bln	2.741.264.382	APBA		12 Bln	3.152.454.039
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya peningkatan perlengkapan dan peralatan kantor	Banda Aceh	12 Bln	600.680.000	APBA		12 Bln	690.782.000
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya peningkatan perlengkapan dan peralatan kantor	Banda Aceh	12 Bln	4.029.369.537	APBA		12 Bln	4.633.774.968
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa tenaga administrasi teknis kegiatan	Banda Aceh	12 Bln	18.048.801.350	APBA		12 Bln	20.756.121.552
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan	Banda Aceh	12 Bln	311.648.285	APBA		12 Bln	358.395.528
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan kebutuhan ATK	Banda Aceh	12 Bln	499.337.647	APBA		12 Bln	574.238.294
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan	Banda Aceh	12 Bln	399.680.569	APBA		12 Bln	459.632.654
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan instalasi listrik dan alat penerangan gedung kantor	Banda Aceh	12 Bln	150.000.000	APBA		12 Bln	172.500.000
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan	Banda Aceh	12 Bln	204.000.000	APBA		12 Bln	234.600.000
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum	Banda Aceh	12 Bln	537.718.884	APBA		12 Bln	618.376.717
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi dalam pencapaian kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran	Banda Aceh	12 Bln	779.774.993	APBA		12 Bln	896.741.242
23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Banda Aceh	12 Bln	600.000.000	APBA		12 Bln	690.000.000
29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung perkantoran yang merupakan aset daerah	Banda Aceh	12 Bln	540.153.438	APBA		12 Bln	621.176.454
39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung	Banda Aceh	12 Bln	1.262.200.000	APBA		12 Bln	1.451.530.000

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2021

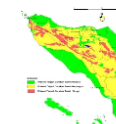


No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					223.918.693.469				257.506.497.489
04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan publik			263.764.670				303.329.370
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terciptanya keseragaman identitas dan disiplin pegawai Dinas	Banda Aceh	12 Bln	0			12 Bln	0
09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terciptanya motivasi, sumber daya Aparatur yang profesional dalam pelayanan publik	Banda Aceh	12 Bln	144.725.000	APBA		12 Bln	166.433.750
10	Sosialisasi Penetapan Peraturan-Undangan	Terlaksananya sosialisasi menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Banda Aceh	12 Bln	119.039.670	APBA		12 Bln	136.895.620
2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					75.865.302.221				87.245.097.554
01	Pengawasan Peredaran Saran Pertanian	Terawasanya distribusi pupuk bersubsidi, pestisida dan Alat mesin pertanian			2.060.007.400				2.369.008.510
01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya peredaran pupuk bersubsidi	Banda Aceh	12 Bln	560.000.000			12 Bln	644.000.000
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan peredaran peralatan mesin pertanian/perkebunan	Banda Aceh	12 Bln	1.500.007.400	APBA		12 Bln	1.725.008.510
02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Sertifikat Benih Unggul Pertanian			72.805.294.821				83.726.089.044
01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kabupaten/Kota	22 Kab/Kota	1.012.934.000	APBA		22 Kab/Kota	1.164.874.100
02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Hortikultura Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu tanaman	Kabupaten/Kota	11 Komoditi 14 Keg	37.300.210.821	APBA		11 Komoditi 14 Keg	42.895.242.444
03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi (MT Gadu).	Banda Aceh	22 Kab	8.032.150.000	APBA		22 Kab	9.236.972.500
04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Terlaksananya Penyediaan Bibit Unggul Tanaman tahunan dan penyegar	Banda Aceh	5 Komoditi	26.460.000.000	APBA		5 Komoditi	30.429.000.000
03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Tersedianya Benih Sumber Bermutu			1.000.000.000				1.150.000.000
04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan	Kabupaten/Kota	3 Komoditi	1.000.000.000	APBA		3 Komoditi	1.150.000.000
3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					740.000.000				851.000.000
03	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian			740.000.000				851.000.000
03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian	Kabupaten/Kota	3 Keg	218.000.000	APBA		3 Keg	250.700.000
04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Terlaksananya Pemberdayaan Keujruen Blang (P3A/GP3A)	Kabupaten/Kota	20 kab/ kota	300.000.000	APBA		20 kab/ kota	345.000.000
09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terlaksananya optimasi lahan pertanian Terlaksananya Perluasan Areal Pertanian	Kabupaten/Kota	20 kab/ kota	222.000.000	APBA		20 kab/ kota	255.300.000
4 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					1.500.000.000				1.725.000.000
01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terkendaliannya Serangan Organisme Pengganggu tanaman			1.500.000.000				1.725.000.000
01.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu tanaman	Kabupaten/Kota	14 Keg	1.500.000.000	APBA		14 Keg	1.725.000.000
5 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					1.350.000.000				1.552.500.000
01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbina dan terawasanya usaha perkebunan besar			1.350.000.000				1.552.500.000
01.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar	Kabupaten/Kota	20 kab/ kota	1.350.000.000	APBA		20 kab/ kota	1.552.500.000

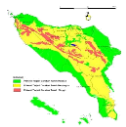
RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2021



No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					223.918.693.469				257.506.497.489
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				18.956.245.105				21.799.681.871
01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Tersedianya tenaga penyuluh yang inovatif dan informatif			400.000.000				460.000.000
01.	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Kabupaten/Kota	6 Keg	0	APBA		6 Keg	0
02.	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	Kabupaten/Kota	6 Keg 28 Kls	400.000.000	APBA		6 Keg 28 Kls	460.000.000
02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Tersedianya hasil penyuluhan penerapan praktek pertanian			8.670.000.166				9.970.500.191
01.	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Tersedianya produk hasil Perkebunan yang memiliki nilai tambah Tersedianya produk hasil pertanian yang memiliki nilai tambah	Kabupaten/Kota	23 Kab/Kota	670.000.000	APBA		23 Kab/Kota	770.500.000
02.	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Kabupaten/Kota	28 Kelas	8.000.000.166	APBA		28 Kelas	9.200.000.191
03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Meningkatnya Kelembagaan dan SDM Petani			9.886.244.939				11.369.181.680
01.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	Kabupaten/Kota	7 Keg	2.999.995.000	APBA		7 Keg	3.449.994.250
02.	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Terlaksananya IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Progame) Bidang Pertanian Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	Kabupaten/Kota	7 Keg	200.000.000	APBA		7 Keg	230.000.000
04.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian	Kabupaten/Kota	SMK PP	6.686.249.939	APBA		7 Keg	7.689.187.430



BAB IV

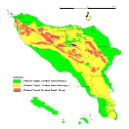
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2021 ini Tujuan, Sasaran, Strategi serta Program/Kegiatan, Rencana Awal RKPA dan Hasil Analisis Pagu Indikatif, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Diharapkan Rencana Kerja ini akan menjadi Dokumen Perencanaan dan Acuan Kerja bagi seluruh Jajaran Bidang Teknis, UPTD dan Sekolah Kedinasan Pertanian Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Secara lebih spesifik, penjabaran mengenai Renja Tahun 2021 ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-ABPA) Tahun 2021.

Sebanyak 5 (lima) Program dan (13) Kegiatan dan Non Kegiatan dijabarkan dalam Renja dengan besaran Rencana Pagu Indikatif sebesar **Rp. 223.918.693.469**, sebagai acuan pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2021. Sehubungan dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Aceh dan dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Melalui Renja ini dapat terlihat bahwa dari 5 (lima) Program direncanakan pagu indikatif pelaksanaan Program/Kegiatan ini memiliki berbagai perubahan yang terjadi dan mempengaruhi pembangunan bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan melalui Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian dan Perkebunan dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Dengan adanya Renja ini, diharapkan Program/Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada pembangunan bidang Pertanian dan Perkebunan Aceh, apabila dipenuhinya target



dan pendanaan yang sesuai dengan program/kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun 2021 ini.

Akhirnya mengingat Renja yang disusun merupakan komitmen kinerja bersama bagi jajaran pimpinan dan aparatur di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, maka diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar demi tercapainya visi, misi dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.